

LKIP – Tahun 2019

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PERWAKILAN
BKKBN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Kata Pengantar



Laporan Kinerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 disampaikan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Substansi yang ada dalam LKIP ini memuat informasi yang berkaitan dengan capaian kinerja selama kurun waktu tahun anggaran 2019 dan menyajikan informasi capaian kinerja, proses pelaksanaan dan tantangan yang dihadapi. Seluruh informasi tersebut tersaji dalam deskripsi yang tertuang dalam analisis capaian kinerja.

Kami berharap LKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi yang obyektif dalam menilai kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, sekaligus sebagai masukan dalam upaya peningkatan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta di masa mendatang.

Yogyakarta, Januari 2020



Plt. Kepala

Rondhiana Sumariati, S.Sos., M.Sc.

Ikhtisar Eksekutif

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta bertindak sebagai unit pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di daerah yang melaksanakan kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat. Perjanjian Kinerja yang diamanahkan kepada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berisi sasaran strategis dan sasaran program dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015 – 2019.

Renstra tersebut memuat Visi BKKBN yaitu “**Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas**”, dengan misi :

- a. Mengarusutamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Memfasilitasi pembangunan keluarga.
- d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
- e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, ditetapkan 5 sasaran strategis, yaitu :

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)
- b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

- d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 ini terdapat 4 (empat) jenis sasaran, yaitu Indikator Sasaran Strategis dengan 6 (enam) indikator, Indikator Kinerja Renstra dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator, Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) dengan 4 (empat) indikator dan Sasaran diluar Renstra dengan 9 (sembilan) indikator. Dari 6 (enam) indikator pada Sasaran Strategis 3 (tiga) diantaranya mampu dicapai dengan capaian lebih dari 100%, sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya mampu dicapai dengan persentase capaian dikisaran sebesar 84,57% s.d. 86,83%. Pada Indikator Kinerja Renstra 36 (tiga puluh enam) dari 37 (tiga puluh tujuh) indikator yang ada dapat tercapai 100% bahkan ada 8 (delapan) indikator yang tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Namun, pada indikator Jumlah Penggerakan Pelayanan KB MKJP capaiannya masih pada indikator merah, yang artinya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan hanya tercapai sebesar 55,08%. Untuk sasaran Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) persentase capaian berada di kisaran 86% s.d. 100%. Sedangkan untuk Indikator Strategis di Luar Renstra kisaran capaian berada pada 80% hingga 180%.

Trend pencapaian indikator kinerja jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya relatif tidak selaras. Hal tersebut dikarenakan dari 56 (lima puluh enam) indikator Perjanjian Kinerja hanya 7 (tujuh) indikator yang selalu diukur dari tahun 2017. Trend capaian tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

NO	INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS										
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	1,86	2,06	89,25%	2,05	2,24	90,73%	2,18	1,80	117,43%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	58,63	53,3	90,91%	54,16	53,9	99,52%	61,95	53,79	86,83%
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA										
3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,30	20,4	119,37%	25,00	20,4	118,40%	24,60	20,40	117,07%
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,03	9,0	71,98%	7,70	9,9	71,43%	8,23	9,50	84,57%
5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	39,05	40,97	104,91%	41,77	47,20	112,99%	32,42	40,80	125,85%
6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	14.840	568	3,83%	9.119	3.931	43,11%	3.767	3.222	85,53%
48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00	100,00	100,00%	100,00	99,54	99,54%	100,0	98,03	98,03%

Anggaran yang diterima oleh Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2018 telah berhasil terserap sebesar 90,84%. Dari pagu anggaran sebesar Rp. 62.946.271.000,-, jumlah yang berhasil direalisasikan adalah sebesar Rp. 57.182.758.054,-

Sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan Program KKBPK di DIY terutama dalam hal peningkatan peserta KB MKJP dan meningkatnya jumlah peserta KB aktif tambahan maka langkah yang perlu dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka

melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;

3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian PA rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB dengan memanfaatkan analisis devinfo yang sudah dilakukan per kecamatan;
4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintegrasi dengan pelayanan papsmeas.
5. Mengintensifkan pembinaan program KKBPK baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong pencapaian Program KKBPK.
6. Mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarluaskan program KKBPK

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	1
C. Aspek Strategis	3
D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya	5
E. Sistematika Penyajian	9
Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja	10
A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	15
C. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis	19
Bab III Akuntabilitas kinerja	22
A. Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran	65
C. Kinerja Dan Capaian Lainnya	67
Bab IV Penutup	76

A. Simpulan	76
B. Langkah-Langkah ke Depan	81
LAMPIRAN.....	83

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2019.....	8
Tabel 1.2 Aset Tetap per 31 Desember 2019	8
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis.....	12
Tabel 2.2 Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2019.....	16
Tabel 3.1 Kategorisasi Indeks Capaian	22
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019.....	23
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019	29
Tabel 3.4 Perbandingan Tahun 2019 dengan Dua Tahun Sebelumnya	30
Tabel 3.5 Perbandingan Tahun 2019 dengan Jangka Menengah	32
Tabel 3.6 Rincian Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)	65

Daftar Gambar

Gambar 1.1. Grafik Komposisi SDM Menurut Jenis Kelamin.....	6
Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Menurut Jabatan.....	6
Gambar 1.3. Grafik Komposisi SDM Menurut Golongan	7
Gambar 1.4. Grafik Komposisi SDM Menurut Pendidikan.....	7
Gambar 3.1. Grafik Perkembangan <i>TFR</i>	54
Gambar 3.2. Grafik Perkembangan <i>mCPR</i>	55
Gambar 3.3. Grafik Perkembangan Tingkat Putus Pakai.....	56
Gambar 3.4. Grafik Perkembangan Unmet Need	56
Gambar 3.5. Grafik Perkembangan Persentase PA MKJP	57
Gambar 3.6. Grafik Perkembangan PA Tambahan	58
Gambar 3.7. Grafik Perkembangan Status Penggunaan BMN.....	58

Bab I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sesuai dengan arah pembangunan pemerintahan periode 2015-2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mendukung pelaksanaan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita), terutama pada Agenda Prioritas nomor 5 (lima) yaitu "Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia" melalui Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana. Di dalam Strategi Pembangunan Nasional (Dimensi Pembangunan), BKKBN berada pada Dimensi Pembangunan Manusia, yang didalamnya berperan serta pada upaya mensukseskan Dimensi Pembangunan Kesehatan serta Mental/Karakter (Revolusi Mental).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka BKKBN berkewajiban untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi, kedudukan, tugas, dan fungsi Perwakilan BKKBN Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta adalah unsur pelaksana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

2. Tugas

Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BKKBN di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan, pembimbingan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional dibidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- b. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- c. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi,

penggerakan hubungan antar lembaga, bina lini lapangan serta pengelolaan data dan informasi di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga.

- e. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk, penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga;
- f. Pelaksanaan tugas administrasi umum;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
- h. Pembinaan dan fasilitasi terbentuknya Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

C. Aspek Strategis

1. Isu Strategis

Beberapa isu strategis dan permasalahan pengendalian kuantitas penduduk yang harus mendapat perhatian khusus adalah :

- a. Angka Fertilitas total (TFR) di DIY berdasarkan beberapa hasil survei menunjukkan tren kenaikan dan saat ini berada di angka 2,2 anak per wanita (laporan SDKI 2017) meskipun angka tersebut lebih rendah dari angka nasional dan mendekati ideal (2,1 anak per wanita).
- b. Kesertaan ber KB
 - 1) Kesertaan ber KB *all method* meningkat menjadi 76%, namun KB modern mengalami penurunan (57,3%), hal ini karena adanya peningkatan metode KB tradisional dari 10,3% menjadi 18,6% (laporan SDKI 2017)

- 2) Angka Putus Pakai masih tinggi yaitu sebesar 28,4% (laporan SDKI 2017)
 - 3) Capaian peserta KB baru (PB) tidak berdampak terhadap penambahan Peserta KB aktif (PA) modern.
 - 4) Prevalensi KB MKJP mengalami penurunan sebesar 2,5% dan saat ini menjadi 18,6%, terutama penurunan pemakaian KB IUD/AKDR/Spiral (laporan SDKI 2017)
- c. Masih rendahnya indeks pengetahuan remaja tentang masa subur yaitu 64,4% (Laporan SKAP 2018).
- d. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- 1) Pesan Kunci Advokasi dan KIE perlu penajaman, terdapat Kesenjangan Mendapatkan Informasi
 - 2) Peran mitra kerja dalam operasional program KKBPK perlu ditingkatkan
 - 3) Dukungan tenaga penggerak lini lapangan perlu ditingkatkan
 - 4) Pemanfaatan Data Kependudukan Berbasis Keluarga perlu dioptimalkan

2. Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi Perwakilan BKKBN DIY dalam Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Program KKBPK selama tahun 2018 adalah :

- a. Meningkatkan akses dan pelayanan KB yang merata dan berkualitas di dalam sistem jaminan kesehatan nasional
- b. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga

- c. Menguatkan advokasi dan KIE tentang KB dan Kesehatan reproduksi
- d. Meningkatkan peran dan fungsi keluarga dalam pengasuhan anak dan perawatan lanjut usia
- e. Menyerasikan landasan hukum dan kebijakan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
- f. Menata dan menguatkan serta meningkatkan kapasitas kelembagaan kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di daerah
- g. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai
- h. Memperkuat penelitian dan pengembangan Bidang KKBPK

D. Struktur Organisasi dan Sumber Daya

1. Struktur Organisasi

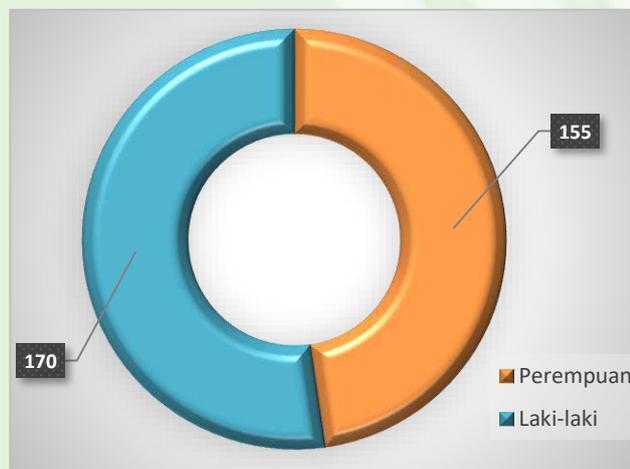
Struktur Organisasi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 82/PER/B5/2011 tanggal 9 Mei 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi, adalah Perwakilan BKKBN Provinsi Tipe A yang berkedudukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala Perwakilan, yang dalam pelaksanaan tugasnya membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengendalian Penduduk;
- c. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- d. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga;
- e. Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi;
- f. Bidang Pelatihan dan Pengembangan; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

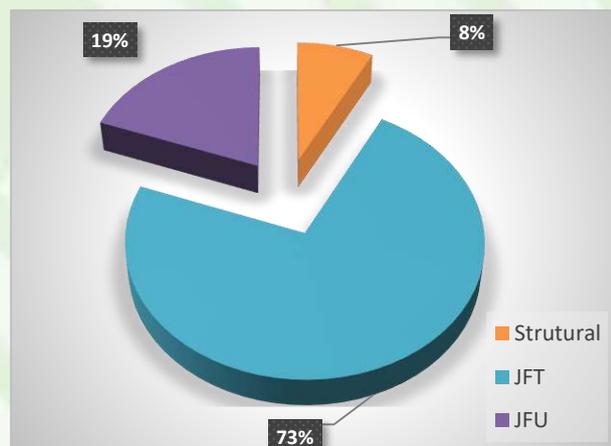
2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang tersedia per 31 Desember 2019 sebanyak 325 orang. Dibandingkan dengan jumlah pegawai per 31 Desember 2018 jumlah pegawai berkurang sebanyak 3 orang dikarenakan adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas sebanyak 20 orang, meskipun pada tahun tersebut juga terdapat penambahan pegawai (CPNS) sebanyak 17 orang.

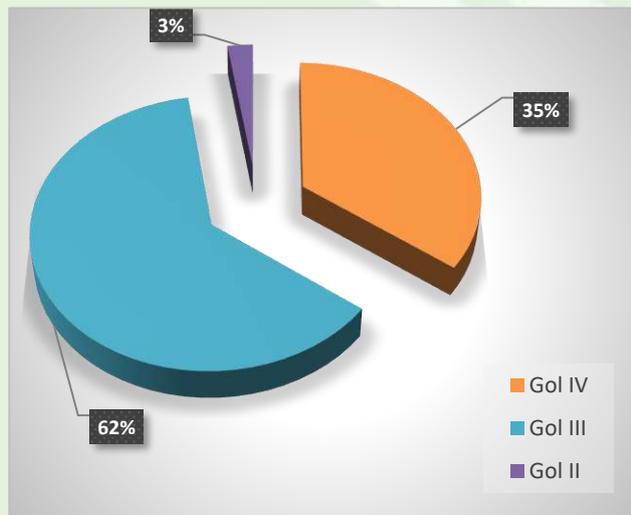
Komposisi Sumber Daya Manusia yang ada di Perwakilan BKKBN DIY dapat digambarkan pada grafik berikut :



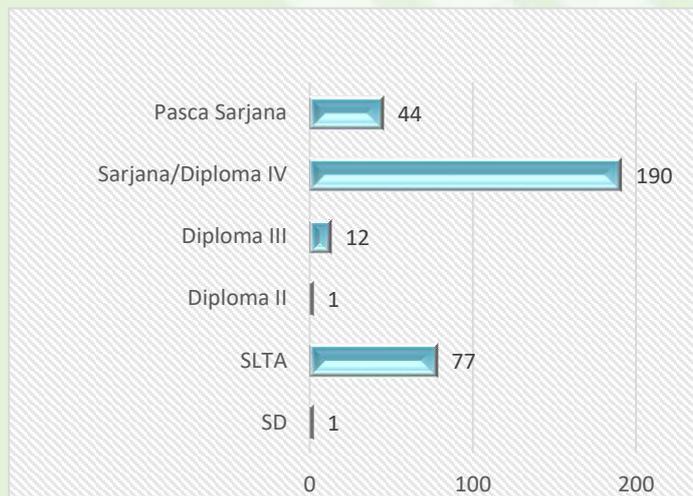
Gambar 1.1. Grafik Komposisi SDM Menurut Jenis Kelamin



Gambar 1.2. Grafik Komposisi SDM Menurut Jabatan



Gambar 1.3. Grafik Komposisi SDM Menurut Golongan



Gambar 1.4. Grafik Komposisi SDM Menurut Pendidikan

3. Sumber Daya Keuangan

Pelaksanaan kegiatan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2019 dibiayai dari DIPA Tahun 2019. Pagu anggaran tahun 2019 sebesar Rp62.946.271.000,- dengan realisasi mencapai Rp57.182.758.054,- atau 90,84%. Rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
 Anggaran dan Realisasi s.d. 31 Desember 2019

Uraian	Anggaran	Realisasi	
		Rp	%
DIPA	Rp. 62.946.271.000,-	Rp. 57.182.758.054,-	90,84

Sumber data : Aplikasi OMSPAN KEMENKEU

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana berupa aset tetap yang ada di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

Tabel 1.2
 Aset Tetap per 31 Desember 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2018	% Naik/ (Turun)
1	Tanah	80.412.488.000	80.412.488.000	0,00
2	Peralatan dan Mesin	7.376.949.274	7.008.663.496	(4,99)
3	Gedung dan Bangunan	12.420.340.625	12.420.340.625	0,00
4	Aset tetap lainnya	35.759.300	32.259.300	(9,78)
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	404.185.200	404.185.200	0,00
6	Akumulasi Penyusutan	(7.049.855.827)	(7.421.979.322)	5,27
Jumlah		93.599.866.572	92.855.957.322	(3,60)

Sumber data : SIMAK BMN

Sarana dan prasarana pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 3,60% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan terdapat BMN rusak berat dalam proses penghapusan.

E. Sistematika Penyajian

Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 menjelaskan pencapaian kinerja selama tahun 2019 dengan berbagai keberhasilan maupun hambatannya, terdiri dari empat bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang latar belakang penyusunan LKIP, kedudukan, tugas dan fungsi, aspek strategis, serta struktur organisasi dan sumber daya.

Bab II Rencana dan Perjanjian Kinerja

Memuat informasi tentang Rencana Strategis tahun 2015 - 2019 dan perjanjian kinerja. Dalam uraian tentang rencana strategis dijelaskan tentang pernyataan visi, misi, tujuan strategis, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, dan perjanjian kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Berisi penjelasan pencapaian kinerja tahun 2018 beserta realisasi anggaran serta perbandingan dengan pencapaian kinerja pada tahun 2016 dan 2017.

Bab IV Penutup

Menguraikan rangkuman capaian sasaran program dan rencana tindak lanjut atau langkah strategis yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja pada tahun 2019.

Lampiran

Berisi data dukung atas penjelasan dalam laporan ini

Bab II

Rencana dan Perjanjian Kinerja

Sebagai salah satu unit kerja BKKBN yang berada di daerah, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program-program yang ditetapkan oleh BKKBN. Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa bertindak sebagai unit pelaksana kebijakan dan program yang telah ditetapkan BKKBN Pusat, sehingga visi dan misi mengacu pada penetapan BKKBN Pusat.

A. Rencana Strategis Tahun 2015 – 2019

Penyusunan Rencana Strategis BKKBN merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra K/L merupakan bagian dari perencanaan nasional, sehingga harus sinkron dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah.

Gambaran singkat Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Visi dan Misi BKKBN

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Untuk itu, BKKBN berkomitmen turut mensukseskan prioritas pembangunan nasional di dalam RPJPN dan agenda prioritas nomor 5 di dalam Nawa Cita melalui:

Visi :

“Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas.”

Misi :

- a. Mengarus-utamakan pembangunan berwawasan kependudukan.
- b. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.
- c. Memfasilitasi pembangunan keluarga.
- d. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten.
- e. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

2. Tujuan Perwakilan BKKBN DIY

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi diatas maka dirumuskan Tujuan Perwakilan BKKBN DIY sebagai berikut :

- a. Menguatkan akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan.
- b. Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksinya (rasional, efektif dan efisien) dan meningkatkan penanganan KB pasca persalinan, pasca

keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi.

- c. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga melalui pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu antar sector dan Kab/Kota.

3. Sasaran Startegis BKKBN

Untuk mencapai tujuan utama di atas Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Menurunnya Angka Kelahiran Total (*TFR*)
- b. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (*CPR*) modern
- c. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
- d. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- e. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis BKKBN Tahun 2015 – 2019, maka BKKBN menetapkan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Indikator	Baseline Target 2014	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,10 (SDKI 2012)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	59,60 (SDKI 2012)	62,28	62,48	62,69	62,89	63,10

No	Indikator	Baseline Target 2014	Target Kinerja				
			2015	2016	2017	2018	2019
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	11,50 (SDKI 2012)	10,69	10,57	10,35	10,23	10,00
4	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	36,21 (SR 2014)	40,56	41,93	42,94	44,12	46,50
5	Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi	27,00 (SDKI 2012)	25,90	25,61	25,21	24,91	24,51

Sumber Data : Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2015-2019

4. Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY

Dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Tahun 2015-2019, Perwakilan BKKBN DIY mempunyai Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 4 (empat) Program Kegiatan, yaitu Program KKBPK Provinsi, Program Dukungan Manajemen (DKM) Provinsi, Program Akuntabilitas pengelolaan (pengawasan) Provinsi dan Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan Provinsi. Berikut Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY :

Tabel 2.2

Sasaran Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	
18	Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi	Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah	Program KKBPK Provinsi	
			Bidang Dalduk Provinsi	
			I.18	Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
			18.1	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk)
			18.2	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan
			18.3	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)
			18.4	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk
		Bidang KB-KR Provinsi		
		II.18	Cakupan Pembinaan Kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah	

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	
18	Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi	Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah	18.5	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP
			18.6	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus
			18.7	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
			18.8	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan
			18.9	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan KBKR di Kabupaten dan Kota
			Bidang KS-PK Provinsi	
			III.18	Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah
			18.10	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah
			18.11	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative
			18.12	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)
			18.13	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL
			18.14	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS
			18.15	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK
			Bidang ADPIN Provinsi	
			IV.18	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK
			18.16	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK
			18.17	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional
			V.18	Persentase petugas lini lapangan (PKB/PLKB) yang mendapat Dukungan Operasional Program KKBPK
			18.18	Jumlah penggerakan pembinaan KKBPK bagi mitra kerja di setiap tingkatan
			18.19	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat
VI.18	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembanguann KKB di seluruh tingkatan wilayah			
18.20	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK			

NO	PROGRAM / KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (OUTPUT)	
18	Pengelolaan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga di Provinsi	Terlaksananya Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga di seluruh tingkatan wilayah	VII.18	Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provinsi
			18.21	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi
24	Pelaksanaan Dukungan Manajemen di Perwakilan BKKBN Provinsi	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam Pengelolaan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi	Program DKM Provinsi	
			Sekretariat Provinsi	
			I.24	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)
			24.1	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)
			24.2	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
24.3	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN,			
28	Peningkatan akuntabilitas pengelolaan program KKBPK di Perwakilan BKKBN Provinsi	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	Program Akuntabilitas pengelolaan (pengawasan) Provinsi	
			Pengawasan Provinsi	
			I.28	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi
			28.1	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK
33	Pelaksanaan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan Provinsi	
			Latbang Provinsi	
			I.33	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang
			33.1	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)
			II.34	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan
			33.2	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan

Sumber data : Renstra Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2015 – 2019

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja akan digunakan pimpinan BKKBN untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, sebagai

dasar melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan kinerja instansi pemerintah, dan menilai keberhasilan atau kegagalan organisasi.

Perjanjian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 memuat indikator sasaran strategis, indikator kinerja renstra, proyek prioritas nasional (Pro PN) dan indikator strategis di luar renstra yang terdiri dari 56 indikator kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2019

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,18
2	Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	61,95
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,23
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	32,42
6	Meningkatnya peserta KB Aktif	6	Jumlah peserta KB Aktif tambahan	3.767
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
	Pengendalian Penduduk Provinsi			
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (5 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	34,00
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 Formal, 1 non formal dan 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi			
		12	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100% (5 Kab/Kota)
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	4.352,00
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1,00
	Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga			
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1,00
	Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi			
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1,00
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	5,00
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2,00
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
	Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi			
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12,00
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12,00
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
	Pengawasan Provinsi			
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1,00
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1,00
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
	Pelatihan Pengembangan Provinsi			
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana - PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	98,00
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1,00
	Penelitian dan Pengembangan Provinsi			
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3,00
C	PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)			
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	323,0
12	Terlaksanannya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	1.859
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	35.435,00
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418,00
D	INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA			
15	Terlaksanannya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,0
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Penilaian mandiri level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4 (Level 1-5)

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	5,00
19	Terlaksanannya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Presentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (skala 1-5)

Sumber data : Perjanjian Kinerja Tahun 2018

C. Monitoring dan Evaluasi Pencapaian Rencana Strategis

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan Program KKBPK sebelum melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara rutin, Perwakilan BKKBN DIY telah menyusun Rencana Aksi Pelaksanaan Kinerja (RAPK) sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Perwakilan BKKBN DIY antara lain melalui :

1. RADALGRAM (Rapat Pengendalian Program)

Forum RADALGRAM dilaksanakan setiap 2 (dua) bulan sekali yang dihadiri oleh seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Perwakilan BKKBN DIY, perwakilan dari OPD KB Kab/Kota dan juga perwakilan dari PKB/PLKB. Dalam rapat tersebut dilaporkan hasil pelaksanaan kinerja, baik tentang capaian program maupun keuangan, setiap bulan sesuai dengan tata cara pencatatan dan pelaporan yang berlaku.

Sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan dalam melaporkan capaian program adalah Sub Sistem Pencatatan dan

Pelaporan Pengendalian Lapangan (Dalap) serta Pelayanan Kontrasepsi (Pelkon). Sedangkan untuk laporan keuangan menggunakan data dari F/II/Keu dan F/V/KB untuk persediaan alat kontrasepsi.

Melalui forum ini diketahui perkembangan capaian kinerja masing-masing kabupaten/kota sehingga dapat diketahui hambatan yang dialami di setiap wilayah untuk kemudian dapat menentukan upaya atau langkah yang harus dilakukan agar dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2. RAKORDA (Rapat Koordinas Daerah)

Rapat Koordinasi Daerah diadakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja dan pelaksanaan program secara tahunan. Rapat ini melibatkan seluruh mitra kerja/stakeholder baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan adanya forum ini dapat mewujudkan penguatan Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) terutama dalam penentuan sasaran program serta kegiatan-kegiatan prioritas yang berkelanjutan di seluruh tingkatan wilayah.

Selain itu juga dapat menjalin sinergitas komitmen, dukungan dan kerjasama antara BKKBN, pemerintah daerah dan mitra kerja di semua tingkatan wilayah sehingga manfaat program KKBPK dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat di seluruh tingkatan wilayah.

3. Review / Telaah Program KKBPK

Review / Telaah merupakan monitoring dan evaluasi kinerja yang dilakukan setiap semester. Forum ini melibatkan seluruh mitra kerja Perwakilan BKKBN DIY baik di tingkat provinsi maupun

kabupaten/kota. Dalam pertemuan ini diketahui perkembangan capaian kinerja sampai dengan semester I dan juga faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat kinerja tersebut. Dalam forum ini selain evaluasi capaian Program juga untuk menggalang komitmen dari pelaksana Program KKBPK dan mitra kerja berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mencapai target kinerja/capaian Program sampai dengan berakhirnya tahun anggaran.

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi / pencapaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pada bab ini akan dibahas hambatan atau kendala dan upaya yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja 2019.

Dengan membandingkan antara data target dan realisasi, akan diperoleh indeks capaian. Penghitungan indeks capaian perlu memperhitungkan kategorisasi capaian. Ketentuan penetapan kategorisasi indeks capaian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1

Kategorisasi Indeks Capaian

No	Interval Capaian	Kategori Capaian	Kode Capaian
1	> 100%	Baik Sekali	BIRU
2	$100\% \leq 87,5\%$	Baik	HIJAU
3	$87,5\% \leq 75\%$	Cukup	KUNING
4	< 75 %	Kurang	MERAH

1) Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Dalam Perjanjian Kinerja terdapat 4 (empat) jenis sasaran, yaitu Indikator Sasaran Strategis dengan 6 (enam) indikator, Indikator Kinerja Renstra dengan 37 (tiga puluh tujuh) indikator, Proyek

Prioritas Nasional (Pro PN) dengan 4 (empat) indikator dan Sasaran diluar Renstra dengan 9 (sembilan) indikator. Cara pengukuran kinerja tahun 2019 ini berdasarkan pada Definisi Operasional Perjanjian Kinerja Provinsi Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh BKKBN Pusat (terlampir). Adapun hasil pengukuran capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019, sebagai berikut :

Tabel 3.2
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS							
1	Menurunnya angka kelahiran total (<i>TFR</i>)	1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,18	1,80	117,43%	SKAP 2019
2	Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (<i>mCPR</i>)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	61,95	53,79	86,83%	SKAP 2019
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60	20,40	117,07%	SDKI 2017
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>Unmetneed</i>)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	8,23	9,50	84,57%	SKAP 2019
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (<i>MKJP</i>)	5	Persentase Peserta KB Aktif <i>MKJP</i>	32,42	40,80	125,85%	SKAP 2019
6	Meningkatnya peserta KB Aktif	6	Jumlah peserta KB Aktif tambahan	3.767	3.222	84,57%	PK2019
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA							
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga							
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah						
Pengendalian Penduduk Provinsi							
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (5 Kab/Kota)	100% (5 Kab/Kota)	100,00%	Bidang Dalduk

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00	100,00	100,00%	Bidang Dalduk
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	34,00	122,00	358,82%	Bidang Dalduk
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 Formal, 1 non formal dan 1 informal)	3 Model (terdiri dari 1 Formal, 1 non formal dan 1 informal)	100,00%	Bidang Dalduk
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1,00	1,00	100,00%	Bidang Dalduk
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi							
		12	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100% (5 Kab/Kota)	100% (5 Kab/Kota)	100,00%	Bidang KB-KR
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	4.352,00	2.397,00	55,08%	Bidang KB-KR
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab	5 frek/th/kab	166,67%	Bidang KB-KR
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00	86,38	101,62%	Bidang KB-KR
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00	100,00	117,65%	Bidang KB-KR

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1,00	1,00	100,00%	Bidang KBKR
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga							
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota	100,00%	Bidang KS-PK
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota	100,00%	Bidang KS-PK
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00	100,00	100,00%	Bidang KS-PK
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00	100,00	100,00%	Bidang KS-PK
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00	100,00	100,00%	Bidang KS-PK
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00	100,00	100,00%	Bidang KS-PK
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitas kegiatan Bidang KSPK	1,00	1,00	100,00%	Bidang KS-PK
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi							
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00	100,00	125,00%	Bidang ADPIN
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1,00	1,00	100,00%	Bidang ADPIN
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media	5 Media	100,00%	Bidang ADPIN

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	5,00	5,00	100,00%	Bidang ADPIN
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota	100,00%	Bidang ADPIN
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00	100,00	100,00%	Bidang ADPIN
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2,00	2,00	100,00%	Bidang ADPIN
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1,00	1,00	100,00%	Bidang ADPIN
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi						
	Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi						
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi	13 bulan 1 Provinsi	100,00%	Sekretariat
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00	94,33	94,33%	Sekretariat
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12,00	12,00	100,00%	Sekretariat
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12,00	12,00	100,00%	Sekretariat
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00	100,00	100,00%	Sekretariat
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur							
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi						
	Pengawasan Provinsi						
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	1,00	1,00	100,00%	Sekretariat

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1,00	1,00	100,00%	Sekretariat
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama							
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi						
	Pelatihan Pengembangan Provinsi						
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana - PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	98,00	118,00	120,41%	Bidang Latbang
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1,00	1,00	100,00%	Bidang Latbang
	Penelitian dan Pengembangan Provinsi						
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	6 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	200,00%	Bidang Latbang
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3,00	4,00	133,33%	Bidang Latbang
C	PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)						
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	323,0	279,00	86,38%	SMART
12	Terlaksananya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	1.859	1.859	100,00%	SMART
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	35.435,00	35.435,00	100,00%	SMART
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418,00	418,00	100,00%	SMART
D	INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA						
15	Terlaksananya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00	98,03	98,03%	SIMAN
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Penilaian mandiri level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,4 (Level 1-5)	3,45	101,47%	Penilaian Mandiri

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00	92,00	141,54%	http://kampungkb.bkkbn.go.id
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	5,00	9,00	180,00%	Bidang ADPIN
19	Terlaksanannya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00	40,00	80,00%	Bidang KS- PK
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00	102,00	102,00%	Bidang ADPIN
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00	82,38	164,76%	Bidang ADPIN
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00	66,00	110,00%	Sekretariat
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3,0 (skala 1-5)	4,05 (skala 1-5)	135,00%	Sekretariat

Dari 6 (enam) indikator pada Sasaran Strategis 3 (tiga) diantaranya mampu dicapai dengan capaian lebih dari 100%, sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya mampu dicapai dengan persentase capaian dikisaran sebesar 84,57% s.d. 86,83%. Pada Indikator Kinerja Renstra 36 (tiga puluh enam) dari 37 (tiga puluh tujuh) indikator yang ada dapat tercapai 100% bahkan ada 8 (delapan) indikator yang tercapai melebihi target yang telah ditetapkan.

Namun, pada indikator Jumlah Penggerakan Pelayanan KB MKJP capaiannya masih pada indikator merah, yang artinya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan hanya tercapai sebesar 55,08%. Untuk sasaran Proyek Prioritas Nasional (Pro PN) persentase capaian berada di kisaran 86% s.d. 100%. Sedangkan

untuk Indikator Strategis di Luar Renstra kisaran capaian berada pada 80% hingga 180%.

Hasil pengukuran capaian kinerja Perwakilan BKKBN DIY jika diukur dari capaian target tahun 2019 yang terdapat dalam Renstra 2015 – 2019 Perwakilan BKKBN DIY, sebagai berikut :

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Renstra Tahun 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE CAPAIAN	SUMBER DATA
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,10	1,80	114,29%	SKAP 2019
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	63,10	53,79	85,25%	SKAP 2019
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	10,00	9,30	107,00%	SKAP 2019
4	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	46,50	40,80	87,74%	SKAP 2019
5	Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi	24,51	20,40	116,77%	SKAP 2019

Dari 5 (lima) indikator yang ada, terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki indeks capaian baik sekali (persentase capaian diatas 100%). Sedangkan untuk 2 (dua) indikator lainnya kisaran persentase capaian sebesar 85% s.d. 87%.

Keberhasilan pencapaian kinerja diatas didukung oleh beberapa faktor antara lain :

- Dukungan berbagai pihak yang menjadi mitra pelaksanaan Program KKBPK di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Tingginya komitmen dan perhatian dari stakeholder maupun masyarakat dalam menerima Sosialisasi Program KKBPK
- Adanya Perda Ketahanan Keluarga tahun 2018 sebagai rujukan bahwa pelaksanaan program ketahanan keluarga dilaksanakan dengan lintas sektor

- Terbentuknya beberapa kampung KB sebagai miniature untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program KKBPK
- Adanya anggaran desa sebagai salah satu pendorong keberlangsungan program KKBPK di tingkat wilayah

Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan Program KKBPK di DIY antara lain :

- Belum optimalnya pemanfaatan media dalam advokasi dan KIE.
- Sosialisasi dan promosi program KKBPK belum semuanya terfokus pada sasaran
- Kurangnya sinergitas program dan anggaran dengan mitra kerja terkait atau pengelola program dari tingkat provinsi hingga tingkat wilayah dalam melakukan pembinaan program KKBPK

2) Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019 dengan Dua Tahun Sebelumnya (2018 dan 2017)

Tabel 3.4

Perbandingan Tahun 2019 dengan Dua Tahun Sebelumnya

NO	INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS										
1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	1,86	2,06	89,25%	2,05	2,24	90,73%	2,18	1,80	117,43%
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	58,63	53,3	90,91%	54,16	53,9	99,52%	61,95	53,79	86,83%
3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	25,30	20,4	119,37%	25,00	20,4	118,40%	24,60	20,40	117,07%
4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,03	9,0	71,98%	7,70	9,9	71,43%	8,23	9,50	84,57%
5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	39,05	40,97	104,91%	41,77	47,20	112,99%	32,42	40,80	125,85%

NO	INDIKATOR KINERJA	2017			2018			2019		
		TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE	TARGET	CAPAIAN	PERSENTASE
A	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS									
6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	14.840	568	3,83%	9.119	3.931	43,11%	3.767	3.222	85,53%
D	INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA									
48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00	100,00	100,00%	100,00	99,54	99,54%	100,0	98,03	98,03%

Dari 56 (lima puluh enam) indikator Perjanjian Kinerja hanya 7 (tujuh) indikator yang selalu diukur dari tahun 2017. Dimana 6 (enam) dari 7 (tujuh) indikator tersebut merupakan Indikator Sasaran Strategis, yaitu Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun), Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR), Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi, Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need), Persentase Peserta KB Aktif MKJP dan Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User).

Sedangkan 1 (satu) indikator merupakan Indikator Startegis di Luar Renstra, yaitu Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya. Sementara 49 (empat puluh sembilan) indikator lainnya tidak dapat diukur perbandingan kinerjanya dikarenakan indikator tersebut tidak selalu ada di setiap tahunnya.

3) Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.5

Perbandingan Tahun 2019 dengan Jangka Menengah 2019

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	CAPAIAN 2019	PERSENTASE CAPAIAN	KETERANGAN
1	Angka kelahiran total (<i>total fertility rate/TFR</i>) per WUS (15-49 tahun)	2,10	1,80	114,29%	Tercapai
2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	63,10	53,79	85,25%	Tidak Tercapai
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	10,00	9,30	106,97%	Tercapai
4	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	46,50	40,80	87,74%	Tidak Tercapai
5	Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi	24,51	20,40	116,77%	Tercapai

Dari capaian diatas diperoleh gambaran bahwa terdapat 3 (tiga) indikator renstra yang tercapai sampai dengan akhir periode Renstra 2015-2019, yaitu Angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun) tercapai sebesar 114,29%, Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) tercapai sebesar 106,97% dan Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi tercapai sebesar 116,77%. Sedangkan 3 (tiga) indikator lainnya tidak tercapai hingga tahun terakhir periode Renstra.

4) Analisis Keberhasilan atau Kegagalan

Pencapaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka Kelahiran Total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)

Pada indikator Angka Kelahiran Total (*TFR*) per WUS (15-49 tahun) di DIY tercapai sebesar 117,43% dari target *TFR* yang ditetapkan dalam KKP Tahun 2019 sebesar 2,10. Sesuai Data

SKAP 2019, angka *TFR* tahun 2019 tercapai sebesar 1,80 sehingga DIY dapat mencapai target KKP yang ditetapkan.

Menurut Buku Penentuan Nilai Ideal dan Ambang Batas Parameter Keluarga Berencana Tahun 2017, nilai ambang batas *TFR* yang ditoleransi adalah antara 1,8 sampai 2,2. Berdasarkan nilai ambang batas ini, DIY telah berada pada nilai *TFR* ideal sejak tahun 1991 (nilai *TFR* adalah 2,04) dan itu berjalan sampai sekarang di 2019 (nilai *TFR* adalah 1,8). Ini menunjukkan bahwa selama hampir 30 tahun kondisi *TFR* di DIY telah ideal. Tetapi tetap perlu diwaspadai adanya trend kenaikan angka capaian *TFR*.

2. Persentase Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern (*mCPR*)

Berdasarkan data SKAP 2019 Perwakilan BKKBN DIY telah mampu mencapai persentase *mCPR* sebesar 86,83% dari target yang ditetapkan, yaitu 53,79% dari total PUS yang ada, dimana target KKP sebesar 61,95%. Hal ini menunjukkan Kinerja Perwakilan BKKBN DIY dalam pencapaian *mCPR* belum dapat memenuhi target KKP yang ditetapkan. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh naiknya pengguna kontrasepsi tradisional, karena secara umum *CPR* naik namun rendah pada *mCPR*, dengan distribusi *CPR* 65% dan 11,2% untuk kontrasepsi tradisional.

Advokasi penggunaan alat kontrasepsi modern pada PUS usia muda dan berpendidikan tinggi harus ditingkatkan karena pada sasaran ini yang merupakan penyumbang besar pengguna kontrasepsi tradisional.

3. Persentase Angka Ketidakberlangsungan Pemakaian (Tingkat Putus Pakai) Kontrasepsi

Tahun 2019 Perwakilan BKKBN DIY ditargetkan untuk menurunkan Tingkat Putus Pakai menjadi sebesar 24,60%. Berdasarkan Data SDKI 2017, tingkat putus pakai kontrasepsi di

DIY sebesar 20,40%. Kondisi ini menunjukkan bahwa DIY sudah mampu menekan angka Tingkat Putus Pakai dengan capaian kinerjanya sebesar 117,07%. Tingkat putus pakai ini rentan pada PUS yang menggunakan kontrasepsi jangka pendek seperti pil dan suntik, masih tingginya angka pemakaian kontrasepsi pada dua alat tersebut menjadikan peluang meningkatnya persentase tingkat putus pakai menjadi lebih besar.

4. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Unmet need*)
Pada tahun 2019 berdasarkan data SKAP 2019, Persentase *Unmet need* di DIY sebesar 9,3%. Angka tersebut menunjukkan bahwa *unmet need* sudah tercapai sebesar 97,00% dari target KKP yang ditetapkan sebesar 8,23%. Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya pengguna kontrasepsi tradisional. Sehingga perlu adanya peningkatan promosi, KIE juga advokasi tentang penggunaan alat kontrasepsi modern terutama pada PUS usia muda dan berpendidikan tinggi.
5. Persentase Peserta KB Aktif MKJP
Berdasarkan data SKAP 2018 Peserta KB Aktif tercapai sebesar 40,80%. Kondisi capaian tersebut, 8,38% lebih tinggi dari target yang ditetapkan atau tercapai sebesar 125,85%. Pembinaan kesertaan berKB MKJP terus dilakukan melalui upaya pengembangan kelompok BKB, BKR, BKL serta UPPKS.
6. Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan
Kondisi jumlah Peserta KB Aktif DIY tahun 2019 bertambah 3.222 peserta dari tahun 2018. Pencapaian peserta KB Aktif tambahan hanya mampu mencapai sebesar 84,57% dari target. Penambahan peserta KB baru yang lebih kecil dari jumlah drop out menjadikan tidak adanya penambahan pada peserta KB Aktif sehingga target tersebut tidak dapat dicapai.

7. Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah

Indikator ini dapat tercapai sesuai target, yang ditandai dengan penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) di tingkat DIY dan 5 kabupaten/kota. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari dukungan anggaran dari Bappeda Kabupaten/Kota dan Biro Kesra Provinsi DIY serta advokasi dan koordinasi dari Perwakilan BKKBN DIY kepada OPD KB dan Bappeda Kabupaten/Kota

8. Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)

Perwakilan BKKBN DIY dapat memenuhi target untuk indikator tersebut dimana setiap Kabupaten/Kota telah menyusun Profil Tematik Program KKBPK. Hal tersebut didukung dengan kerjasama yang baik antara Perwakilan BKKBN DIY dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gajah Mada Yogyakarta serta adanya dukungan anggaran dari Perwakilan BKKBN DIY untuk penyusunan Profil tersebut

9. Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan

Pada tahun 2019, dari 160 Kampung KB yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta ditargetkan 34 Kampung KB memiliki Rumah Data Kependudukan (RDK). Berdasarkan hasil pendataan K/0 RDK tahun 2019 menunjukkan bahwa sudah 122 Kampung KB yang telah membentuk RDK. Kondisi tersebut menunjukkan

bahwa Perwakilan BKKBN DIY telah melebihi target yang ditetapkan.

Keberhasilan ini dicapai dengan koordinasi yang intensif antara stakeholder di tingkat pusat, kabupaten/kota, dan stakeholder di lokasi kampung KB serta adanya dana stimulan untuk sarana dan prasarana RDK

10. Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)

Pada tahun 2019 Perwakilan BKKBN DIY telah melakukan pembinaan dari ketiga jalur tersebut sesuai dengan target yang ditetapkan. Melalui jalur formal telah dibentuk 5 (lima) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) tingkat SMA dan 19 (sembilan belas) SSK tingkat SMP. Selain itu telah dilaksanakan Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Universitas Gunung Kidul.

Sedangkan untuk jalur non formal dilakukan pembinaan melalui Saka Kencana dan kegiatan kepramukaan di SSK yang telah dibentuk, serta memberikan materi pendidikan kependudukan kepada peserta diklat di Bidang Latbang Perwakilan BKKBN DIY, Pusdiklat Kemendagri Regional Yogyakarta dan Badan Diklat Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada jalur informal telah dilaksanakan pembinaan implementasi pendidikan kependudukan terhadap 5 (lima) CoE Kampung KB atau 1 (satu) CoE Kampung KB disetiap Kabupaten/Kota baik pemberian materi maupun pembentukan pojok kependudukan di Rumah Data Kependudukan.

Keberhasilan ini dicapai dengan koordinasi, advokasi, dan sosialisasi pendidikan kependudukan kepada mitra kerja dan stakeholder. Walaupun dalam pelaksanaannya banyak

terkendala dalam penyediaan dukungan anggaran, sarana prasarana, dan materi terkait dengan pembentukan pojok kependudukan baik di jalur formal, non formal, maupun informal.

11. Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan oleh bimbingan teknis di 5 (lima) Kabupaten/Kota sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak lepas dari ketersediaan anggaran, dukungan dari mitra kerja dan stakeholder untuk implementasi kegiatan tersebut di lapangan

12. Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah

Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB ini ditargetkan meliputi 1 Provinsi dengan 4 Kabupaten dan 1 Kota, dan telah dapat dilaksanakan sesuai dengan target tersebut sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah.

13. Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP

Pada tahun 2019 terdapat klaim penggerakan sebanyak 2.397 kasus (55,08%) dari 4.352 kasus yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena diantaranya adanya kekosongan KPA hingga akhir semester satu, sehingga klaim penggerakan baru dapat diajukan setelah semester ke dua, lalu belum seragamnya persepsi dan terdapat kesulitan dalam melengkapi dokumen penggerakan untuk pengajuan klaim serta beberapa faskes yang keberatan jika berkas pasien/akseptor dicopy karena menurut mereka dokumen tersebut merupakan dokumen rahasia.

14. Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus

Telah dilaksanakan 5 frekwensi pelayanan KB bergerak pada tahun 2019, berupa pelayanan MOP/MOW dari target semula 3 frekwensi pelayanan KB bergerak IUD/Implan. Perubahan pelayanan dari IUD/Implan menjadi MOP/MOW dilaksanakan untuk memfasilitasi calon akseptor yang menghendaki untuk mendapatkan layanan MOP/MOW yang tidak dapat terlayani dan diklaim melalui sistem BPJS.

15. Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan

Dari target 85% yang ditetapkan di tahun 2019, telah tercapai 86,38% (279 dari 323 faskes) yang bekerjasama dengan BPJS. Kondisi ini disebabkan belum seluruh faskes bersedia untuk bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk pelayanan KBKR. Persoalan rumitnya administrasi dan klaim BPJS menjadi alasan belum seluruh faskes bekerjasama dengan BPJS.

Selain hal tersebut di atas, terdapat beberapa tempat pelayanan KB yang sebelumnya masih teregister dalam system RR sebagai faskes, saat ini sudah tidak lagi berstatus sebagai faskes tetapi menjadi jejaring Faskes (Praktek Mandiri Bidan), sehingga jumlah Faskes yang ada berkurang menjadi hanya 279 saja.

16. Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota

Seluruh faskes telah melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

17. Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota

Telah dilaksanakan monitoring dan pembinaan serta fasilitasi kegiatan KBKR di 4 Kabupaten dan 1 Kota di seluruh DIY.

18. Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah

Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga sudah dapat terlaksana dengan baik, hal ini sebagai bukti bahwa program Pembangunan Keluarga secara umum sudah menjadi perhatian serius baik oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta komitmen dan dukungan anggaran oleh APBN, APBD I maupun APBD II.

19. Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah

Pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan KS PK dalam Program Pembangunan Keluarga (PK) sudah terlaksana dengan baik juga. Salah satu bukti bahwa Sosialisasi dan Diseminasi Program PK diterima dengan baik adalah dengan diterbitkannya PERDA Daerah Istimewa Yogyakarta No.7 tahun 2018 tentang Ketahanan Keluarga. Dan salah satu amanat yang tertuang didalamnya adalah pelaksanaan fungsi keluarga, yang lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Gubernur. Hal tersebut sejalan dengan substansi yang BKKBN sampaikan dalam setiap kegiatan sosialisasi, diseminasi maupun kegiatan serupa lainnya.

20. Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB
Holistic Integrative

Persentase kabupaten/kota yang mengembangkan kegiatan BKB HI sudah tercapai 100 %, artinya 5 kabupaten/kota telah melakukan pembinaan terhadap beberapa kelompok BKB potensial untuk diintegrasikan dengan layanan terpadu lainnya, seperti posyandu, PAUD maupun SDIDTK.

Tahun 2019 ada 1.434 kelompok BKB yang belum terintegrasi, selanjutnya dari 1.434 kelompok BKB tersebut lahir 55 BKB HI hasil pembinaan Kabupaten Bantul, 77 BKB HI hasil pembinaan Kabupaten Sleman, 38 BKB HI hasil pembinaan Kabupaten Gunungkidul, 35 BKB HI hasil pembinaan Kabupaten Kulonprogo dan 55 BKB HI hasil pembinaan Kota Yogyakarta.

21. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan
Genre (PIK-R/M dan BKR)

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan GenRe ke kelompok PIK R/M dan kelompok BKR yang tersebar di 5 kabupaten/kota sudah tercapai 100 %. Pembinaan tersebut dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan kelompok agar terus aktif dan berkembang sebagai wadah yang efektif dalam penyampaian informasi dan edukasi penyiapan perencanaan kehidupan berkeluarga baik bagi remaja.

22. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan BKL sudah tercapai 100 %, artinya 5 kabupaten/kota sudah melaksanakan pembinaan terhadap kelompok BKL untuk disiapkan menjadi kelompok yang lebih baik dan menjadi model percontohan bagi kelompok BKL lainnya. Pembinaan kelompok BKL diarahkan pada upaya penerapan 7 (tujuh) dimensi lansia

tangguh dan mampu berinteraksi/berintegrasi dengan dinas/sektor lain dalam mengakses layanan maupun program yang ada.

23. Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS

Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga terhadap 217 kelompok UPPKS yang tersebar di 5 kabupaten/kota sudah tercapai 100 %. Pembinaan dilaksanakan dalam bentuk pendampingan berupa orientasi packaging dari BPTTG DIY dan Dinas Koperasi dan UKM DIY, fasilitasi akses pemasaran melalui berbagai momentum strategis seperti Hari Keluarga, Rakorda, kegiatan-kegiatan nasional yang dilaksanakan di Yogyakarta, dsb. Juga fasilitasi akses permodalan melalui sarasehan kelompok UPPKS potensial sekaligus gelar dagang kelompok UPPKS oleh Koperasi AKU Sejahtera DIY.

24. Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK

Pembinaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kegiatan Bidang KSPK sudah terlaksana sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Seperti halnya pembinaan, monev dan fasilitasi pencegahan kasus stunting yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Pembinaan dan fasilitasi CoE BKL juga sudah terlaksana di 5 kabupaten/kota, ada CoE BKL Asih Wreda dari Kabupaten Bantul, CoE BKL Melati dari Kabupaten Sleman, CoE BKL Manunggal Asih dari Kabupaten Gunungkidul, CoE BKL Melati dari Kabupaten Kulonprogo dan CoE BKL Delima 123 di Kota Yogyakarta. Begitu juga pembinaan dan fasilitasi ke kelompok UPPKS yang dilaksanakan oleh Forum

UPKKS Kencana Kabupaten Kulonprogo dengan menghadirkan beberapa kelompok UPPKS unggulan perwakilan dari masing-masing kecamatan se Kabupaten Kulonprogo.

25. Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK

Pembinaan advokasi dan KIE program KKBPK bagi stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah 5 kabupaten/kota sudah tercapai 100% dari target yang ditentukan yaitu sebesar 80%.

26. Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK

Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK sudah dilaksanakan sesuai target yaitu 1 kali. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memberikan advokasi bagi para pemangku kepentingan/pengambil kebijakan agar selalu mendukung pelaksanaan program KKBPK serta meningkatkan pengetahuan maupun partisipasi aktif dari masyarakat luas melalui KIE.

27. Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional

Penayangan berbagai informasi KKBPK sudah terlaksana 100% dari target yang diharapkan yaitu penayangan melalui 5 media berupa media cetak (koran, buku, leaflet, dll), media elektronik (Televisi, radio maupun media berbasis online), media luar ruang (baliho, spanduk, backdrop, dll), media seni dan budaya/tradisional (kirab budaya, dll).

28. Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat

Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat berhasil menjangkau semua kabupaten kota se-DIY, yaitu sebanyak 4 kabupaten dan 1 kota sebagaimana tercantum dalam target atau tercapai 100 persen. Kabupaten kota dimaksud adalah Kabupaten Sleman, Bantul, Kulon Progo dan Gunungkidul serta Kota Yogyakarta. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam upaya tersebut antara lain : monitoring evaluasi terpadu kinerja PKB, Bimbingan teknis pelaksanaan penggerakan mekanisme operasional lini lapangan dan Pelaksanaan remedial sertifikasi PKB.

29. Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah
Wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB di seluruh tingkatan wilayah ditargetkan mencakup 1 provinsi dan 5 kabupaten kota. Kegiatan yang melibatkan provinsi dan semua kabupaten kota berhasil dapat terlaksana dengan baik, antara lain : Bimbingan teknis pokja di kampung KB, dukungan pelatihan Kampung KB Percontohan, Bimbingan kapasitas pembinaan PKB, dan Forum jejaring kemitraan KKBPK.

30. Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK

Kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi Program KKBPK mencakup 100 persen sesuai target. Beberapa kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan mengikutsertakan secara aktif semua stakeholder dan mitra kerja terkait, antara lain seperti dalam kegiatan : Pertemuan integrasi

Kampung KB bersama mitra kerja baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota, pembinaan terpadu bersama mitra kerja di Kampung KB, Pengintegrasian kemitraan dengan pemangku kepentingan daerah.

31. Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi
Pengelolaan Data dan Informasi program KKBPK dilaksanakan melalui 1 (satu) Sistem Pencatatan dan Pelaporan Statistik Rutin yang berjalan dengan baik di 5 (lima) Kabupaten/Kota (100%). Selain itu Pengelolaan Data by name by address dilaksanakan dengan Sistem Informasi Pendataan Keluarga dan Uji Coba Sistem Informasi Keluarga di seluruh Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta.
32. Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi
Pengelolaan Data dan Informasi KKBPK melalui Statistik Rutin Terdiri atas dua subsistem yaitu Pelayanan KB dan Pengendalian Lapangan. Keberhasilan pelaksanaan pencatatan dan pelaporan Statistik Rutin tentunya didukung dengan adanya sarana Tehnologi Informasi di Balai Penyuluhan dan komitmen dari Penyuluh Keluarga Berencana yang melaporkan kegiatannya setiap bulan secara tepat waktu.
33. Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002).
Untuk dukungan Manajemen di Provinsi telah tercapai 100% dari target yang telah ditetapkan, pembayaran gaji/001 dan kegiatan layanan perkantoran dilakukan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Dan untuk kondisi sampai dengan Desember 2019 tidak ada kewajiban/tagihan yang belum dibayarkan kecuali untuk Tunjangan Kinerja dan Uang Makan

Pegawai bulan Desember 2019 karena adanya kebijakan lain dari BKKBN Pusat.

34. Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Utama BKKBN Nomer: 3627/I/KU.01.04/B3/2019 tentang Mekanisme Pembayaran Tunjangan Kinerja dan Uang Makan bagi pegawai ASN serta Pembayaran Penghasilan PPNPN bulan Desember 2019 yang menyebutkan bahwa pembayaran uang makan pegawai bulan Desember 2019 dibayarkan pada Januari 2020 sehingga menyebabkan Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai pada Perwakilan BKKBN DIY tahun 2019 tidak dapat tercapai secara optimal. Capaian persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai pada Perwakilan BKKBN DIY tahun 2019 adalah sebesar 94,33%.

35. Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran.

Untuk penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran juga tercapai 100%, kegiatan ini meliputi pembayaran langganan daya/ jasa, pemeliharaan perkantoran yang dilaksanakan secara rutin setiap bulannya.

36. Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)

Kegiatan pada indikator ini meliputi kegiatan yang mendukung pelaksanaan Program KKBP ada di 4 (empat) Sub Bagian dilingkungan Sekretariat dimana Perwakilan BKKBN DIY telah mampu memenuhi target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%.

37. Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) telah tercapai 100% berupa

pengadaan AC dan Sarana Pengolah Data untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Program KKBPK di DIY.

38. Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi.

Kegiatan ini merupakan kegiatan preventif dari jajaran Pengawasan dalam rangka mengawal pelaksanaan Program KKBPK sehingga akuntabilitas kinerja dan anggaran dapat meningkat kualitasnya, dengan meminimalisir temuan.

39. Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK.

Keberhasilan dari kegiatan ini adalah masuknya Perwakilan BKKBN DIY menjadi nominator percontohan wilayah ZI WBK di Perwakilan BKKBN.

40. Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana - PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas.

Sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta telah melatih sebanyak 118 orang dari target sebanyak 98 orang, dengan perincian sebagai berikut :

- a. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis PKB dengan jumlah peserta sebanyak 50 Orang;
- b. Pelatihan Pengelolaan Kampung KB Percontohan dengan jumlah peserta sebanyak 39 Orang;
- c. Pelatihan Pengelola SIGA dengan jumlah peserta sebanyak 29 Orang.

Hal tersebut dapat tercapai karena didukung dengan koordinasi dan dukungan yang baik dengan komponen terkait dan dengan

stakeholder instansi pengirim peserta pelatihan, yaitu OPD KB Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

41. Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)

Untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kompetensi pegawai maka dilakukan orientasi peningkatan budaya kerja bagi seluruh pegawai Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak 1 angkatan dengan materi tentang komunikasi efektif. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh seluruh komponen terkait di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.

42. Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan

Sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) penelitian dan pengembangan program KKBPK, Bidang Latbang melakukan identifikasi kebutuhan penelitian dan pengembangan yang dibutuhkan pada akhir tahun 2018. Berdasarkan hal tersebut untuk menunjang kualitas hasil penelitian maka Bidang Latbang melakukan kerjasama dengan beberapa pakar dan akademisi dari beberapa perguruan tinggi. Berikut judul-judul kajian yang telah dilakukan:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB: Studi Evaluasi Penerapan Strategi Konseling Berimbang KB di DIY, Kerjasama antara Perwakilan BKKBN DIY dan LPPM Universitas Alma Ata Yogyakarta
2. Studi Komparatif Penggunaan KB Tradiaional Kawasan Perdesaan dan Perkotaan di DIY, Kerjasama antara Perwakilan BKKBN DIY dengan LPPM Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

3. Peran Rumah Dataku dan Intervensi Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat: Studi Kasus Kampung KB Pedukuhan Ngramang, Kerjasama antara Perwakilan BKKBN DIY dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
 4. Sebuah Alternatif Pengembangan Kampung KB dengan Collaborative Innovation, Kerjasama antara Perwakilan BKKBN DIY dan Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
 5. Migrasi dan Program KKBPK di Kab. Kulon Progo, Kerjasama antara Perwakilan BKKBN DIY, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada dan Pemerintah Daerah Kulon Progo.
 6. Evaluasi Pencapaian Program Penurunan Usia Nikah 15-19 Tahun di Kecamatan Saptosari Kab. Gunungkidul, kerjasama antara Perwakilan BKKBN DIY dengan Universitas Negeri Yogyakarta.
43. Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan Perwakilan BKKBN DIY pada tahun 2019 telah menyelenggarakan Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia dengan tema "Industri 4.0 Menuju Society 5.0: Transformasi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045" selama satu hari di Sahid Raya Hotel. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama yang dilakukan oleh Bidang Latbang, dan direncanakan akan dilakukan setiap tahun dengan topik yang berbeda. Output dari seminar ini adalah Prosiding dengan nomor ISBN: 978-623-92533-01 yang dapat

diakses secara gratis pada laman berikut:

<http://eprints.latbangdjogja.web.id:8085/73/>

Respon yang sangat baik dari para peserta dan penyaji dari universitas dan institusi di berbagai daerah di Indonesia, maka pada kesempatan tersebut hanya dapat mendiseminasikan empat karya hasil kerjasama penelitian. Untuk dua penelitian akan direncanakan didiseminasikan pada awal tahun 2020 bersama dengan empat kajian/penelitian mitra kerja yang mendapatkan hibah dana dari Puslitbang Kependudukan (PUSDU) dan Puslitbang KB dan KS (PUSNA).

44. Pemenuhan Ketersediaan Alkon di Faskes

Pemenuhan ketersediaan alkon tercapai pada 279 dari 323 faskes (86.38%) yang telah bekerjasama dengan BPJS di seluruh Kabupaten dan Kota se-DIY. Hal ini terjadi karena Praktek Mandiri Bidan (PMB) yang sedianya menjadi faskes yang teregister, dalam era BPJS ini menjadi jejaring dari FKTP, sehingga jumlah Faskes menjadi berkurang. Akan tetapi, alkon tetap terdistribusi hingga ke PMB.

45. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan

Promosi dan konseling Kesehatan reproduksi melalui kelompok kegiatan telah tercapai pada 3.236 dari 1859 Poktan yang ditargetkan. Hal ini tercapai melalui berbagai sosialisasi dan pertemuan langsung dengan kelompok kegiatan, serta distribusi materi dan buku promosi kesehatan reproduksi bagi kelompok kegiatan di Kabupaten/Kota se-DIY.

46. Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK

Penyampaian informasi dan edukasi pola asuh pada masa 1000 HPK bagi 35.435 keluarga yang mempunyai baduta sudah

tercapai 100 %. Sasaran tersebut ada di 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Kulonprogo (target sasaran 10.762, roadmap 2018) dan Kabupaten Bantul (target sasaran 24.673, roadmap 2019). Informasi dan edukasi yang disampaikan ada dalam bentuk cetak seperti buku pegangan kader, leaflet dan stiker maupun sosialisasi langsung oleh expert dan juga para pemangku kepentingan. Dari aspek promotif, preventif penyampaian informasi dan edukasi pentingnya 1000 HPK juga disampaikan pada ibu hamil, ibu menyusui serta para tokoh agama maupun masyarakat, dimaksudkan agar lebih efektif dan efisien dalam penyebaran ilmu dan informasi. Pertemuan rutin yang dilaksanakan kelompok BKB menjadi salah satu forum/media sosialisasi penyampaian informasi dan edukasi 1000 HPK.

47. Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu

Penyampaian informasi dan edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu sudah tercapai sesuai target (418 kelompok PIK R dan BKR). Target sasaran ada di 279 kelompok PIK R/M dan 139 kelompok BKR yang tersebar di 5 kabupaten/kota. 4 (empat) substansi pokok program GenRe menjadi materi yang harus disampaikan, adalah kondisi kependudukan, perencanaan kehidupan berkeluarga, kesehatan reproduksi dan life/soft skill.

48. Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya

Berdasarkan Surat Keputusan tentang Penetapan Stastus Penggunaan dari Kementerian Keuangan dan BKKBN, persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya sebesar 98,03%. Capaian ini masih dibawah target yang ditetapkan dikarenakan adanya pembelian aset ekstrakomtabel yang di

laksanakan pada akhir tahun sehingga belum dapat diusulkan status penggunaannya sesuai batas waktu yang telah ditentukan.

49. Penilaian mandiri level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 3,45, nilai yang diperoleh ini telah mencapai 101,47% jika dibandingkan dengan target. Berdasarkan kondisi ini capaian kinerja yang ditunjukkan di level sangat baik. Kinerja ini ditunjang oleh komitmen dari level pimpinan sampai staf dalam pelaksanaannya.

50. Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB.

Pokja Kampung KB DIY ditargetkan sebanyak 65 persen sedangkan sesuai dengan pantauan laporan Kampung KB online sampai dengan akhir tahun 2019 DIY pokja Kampung KB DIY sudah mencapai 92 persen. Keberhasilan ini tak lepas dari berbagai kegiatan pendukung yang telah dilakukan seperti advokasi kepada pemerintah daerah maupun pembinaan di wilayah Kampung KB. Selain itu juga didukung melalui kegiatan pelatihan bagi Pokja Kampung KB sehingga dapat memperkuat dan mendorong kinerja POKJA Kampung KB.

51. Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota

Sebagai upaya pengembangan dan peningkatan kualitas Kampung KB, maka sesuai dengan road map untuk tahun 2019 dibentuk satu Kampung KB Percontohan di masing-masing kabupaten kota. Atas inisiatif dan antusias pemerintah kabupaten kota, maka DIY mampu membentuk 9 Kampung KB percontohan dari target 5 Kampung KB percontohan atau tercapai 180 persen.

Ke-sembilan Kampung KB Percontohan sudah ber-SK dan dicanangkan di tingkat DIY pada tanggal 27 Agustus 2019.

52. Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan

Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan baru tercapai 40 %, oleh karena baru ada 2 PPKS di tingkat kecamatan yang masih aktif yaitu PPKS "BERSAHAJA" di Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta dan PPKS "PUNTADEWA" di Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulonprogo. Memang masih ada beberapa permasalahan yang menjadi perhatian bersama perihal pelaksanaan pelayanan PPKS, antara lain masih minimnya SDM sebagai pengelola maupun pelaksana PPKS, sarana dan pra sarana pendukung pelaksanaan PPKS di balai Penyuluhan KKPBK serta peningkatan kompetensi bagi pelaksana dalam memberikan 8 layanan PPKS yang belum terakomodir.

53. Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga

Pendataan Keluarga sebagai pengelolaan Basis Data Keluarga Indonesia telah berjalan dengan baik. Capaian Kinerja Pendataan Keluarga sebesar 113% dari target kinerja yaitu terdatanya 90% Kepala Keluarga dalam Basis Data Keluarga Indonesia. Sampai dengan 31 Desember 2019 telah terdata sebanyak 1.040.697 Kepala Keluarga atau telah tercapai sebanyak 102% dari target Kepala Keluarga yang harus didata sebanyak 1.022.456 KK. Keberhasilan peningkatan cakupan Kepala Keluarga yang didata salah satunya yaitu penentuan lokus pemutakhiran data pada lokasi wilayah Kampung KB.

54. Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA

Cakupan Fasilitas Kesehatan yang teregister dalam SIGA tercapai sebanyak 60,90% atau sebanyak 556 Faskes dari 913 Faskes yang dengan capaian kinerja 121,8%. Sedangkan Kelompok Kegiatan yang teregister dalam database SIGA yaitu sebanyak 1.289 Bina Keluarga Balita, 548 Bina Keluarga Remaja, 637 Bina Keluarga Lansia, 2038 Kelompok UPPKS dan 318 PIK Remaja/Mahasiswa. Capaian Poktan SIGA yaitu 81,35% dengan capaian kinerja 162,7%. Keberhasilan kinerja ini didukung dengan beberapa kegiatan antara lain Pelatihan SIGA, Orientasi SIGA bagi Kader dan Faskes serta monitoring secara terus menerus melalui WA Group.

55. Presentase peta kompetensi PNS

Peta kompetensi PNS diukur berdasarkan keikutsertaan PNS Perwakilan BKKBN DIY dalam mengikuti asesmen. Sampai dengan Desember 2019, PNS yang telah mengikuti asesmen berjumlah 68 orang dari 103 pegawai yang ada atau sebesar 66%. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY telah mampu mencapai 110% dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 60%.

Standar pelaksanaan asesmen disesuaikan dengan masing-masing jenjang jabatan dan dilakukan oleh pihak ketiga (Lembaga Asesmen Center) yang telah memenuhi kompetensi berdasar standarisasi yang ditetapkan BKKBN Pusat.

56. Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi

Tingkat internalisasi budaya CETAK TEGAS diukur berdasarkan penilaian metode feedback 360' yaitu metode penilaian dimana

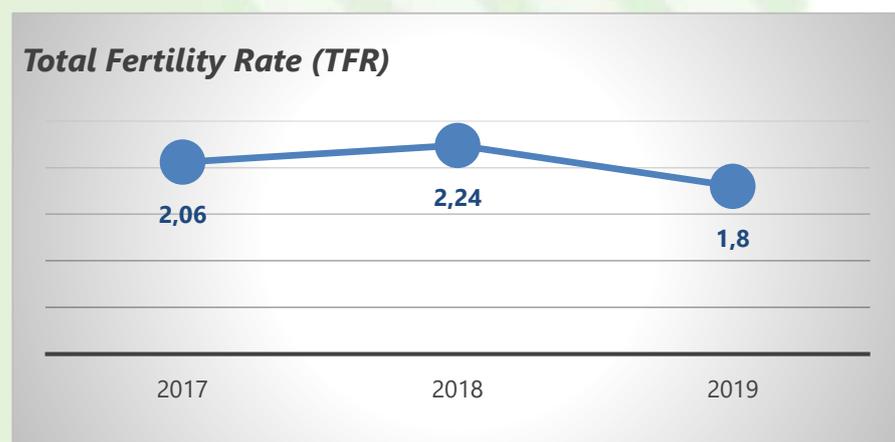
seorang pejabat atau pegawai dinilai berdasarkan umpan balik dari orang-orang yang memiliki hubungan kerja dengannya. Baik itu atasan, rekan kerja (peer group), bawahan, penerima layanan maupun stakeholders lainnya.

Dari hasil pengukuran tersebut nilai yang diperoleh Perwakilan BKKBN DIY adalah 4,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perwakilan BKKBN DIY telah melampaui target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019

5) Analisis Kenaikan atau Penurunan Kinerja

Dari 56 (lima puluh enam) indikator yang ada dalam perjanjian kinerja, hanya 7 (tujuh) indikator yang tidak mengalami perubahan dari tahun 2017. Sehingga hanya 7 (tujuh) indikator tersebut yang bisa dianalisa kenaikan atau penurunan kinerjanya. Perkembangan kinerja dari ketujuh indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun)

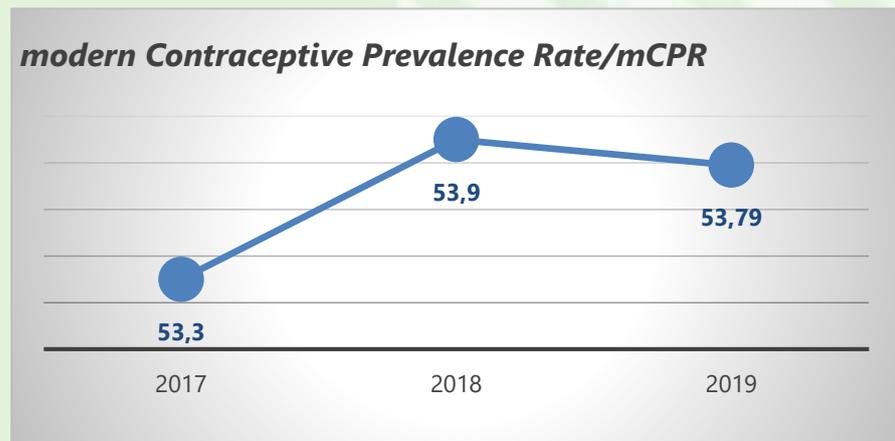


Gambar 3.1. Grafik Perkembangan *TFR*

Sejak tahun 2017 trend Angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) per WUS (15-49 tahun) terlihat masih fluktuatif, terjadi peningkatan di tahun 2018 sebesar 0,18 namun mengalami

penurunan sebesar 0,44 pada tahun 2019. Meskipun sempat mengalami kenaikan, namun di tahun berikutnya terjadi penurunan yang cukup signifikan, lebih dari dua kali lipat. Angka TFR saat ini berkisar 2,24-1,8 masih dalam kondisi ideal, tetapi tetap harus diwaspadai terjadinya kenaikan kembali berdasarkan trend sebelumnya.

2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence rate/mCPR*)



Gambar 3.2. Grafik Perkembangan *mCPR*

Selama tiga tahun terakhir, trend penggunaan kontrasepsi modern masih fluktuatif. Terjadi kenaikan di tahun 2017 dan penurunan pada 2019 meskipun tidak signifikan, sebab angkanya masih di bawah 1%. Hal ini menggambarkan bahwa kondisi penggunaan kontrasepsi di DIY berada pada kisaran 54%. Diperlukan upaya-upaya yang out of the box untuk dapat meningkatkan persentase mCPR ini sebab trend dari tahun ke tahun hanya mengalami perubahan yang sangat kecil bahkan tampak menurun di tahun 2019. Fokus kegiatan lebih diarahkan pada WUS usia muda dengan Pendidikan tinggi dan perlu juga pengembangan metode KIE yang berbeda dan terfokus pada sasaran.

3. Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi



Gambar 3.3. Grafik Perkembangan Tingkat Putus Pakai

Angka putus pakai menunjukkan trend yang positif, meskipun tampak stagnan namun mampu konsisten mencapai target yg ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan kualitas penggunaan kontrasepsi yang baik di wilayah DIY, jika dikaitkan dengan persentase yang besar pada penggunaan kontrasepsi jangka pendek namun tingkat putus pakainya cenderung rendah. Artinya pemahaman WUS terhadap cara penggunaan maupun faktor risiko yang ditimbulkan cukup memadai.

4. Persentase Kebutuhan Ber KB Yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)



Gambar 3.4. Grafik Perkembangan Unmet Need

Indikator persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) meskipun masih terlihat fluktuatif namun telah menunjukkan trend yang positif. Tampak terjadi penurunan angka *unmet need* dari tahun 2018 meskipun angka penurunannya masih di bawah 1%. Kondisi ini erat kaitannya dengan keberhasilan kinerja Perwakilan BKKBN DIY dalam melakukan promosi maupun KIE dan advokasi kepada masyarakat juga stakeholder terkait.

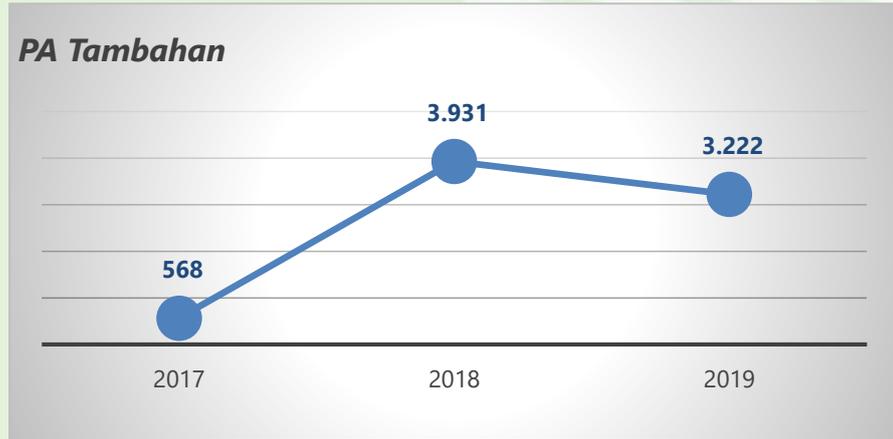
5. Persentase Peserta Aktif MKJP



Gambar 3.5. Grafik Perkembangan Persentase PA MKJP

Selama tiga tahun terakhir, trend presentase Peserta KB Aktif MKJP masih fluktuatif dimana terjadi kenaikan di tahun 2017 dan penurunan pada 2019. Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, terdapat penurunan karena sebagian akseptor MKJP yang telah beralih ke non MKJP berdasar pada sistem kafetaria. Sehingga Perwakilan BKKBN DIY perlu meningkatkan advokasi KIE penggunaan alat kontrasepsi MKJP terutama pada PUS usia muda dan berpendidikan tinggi.

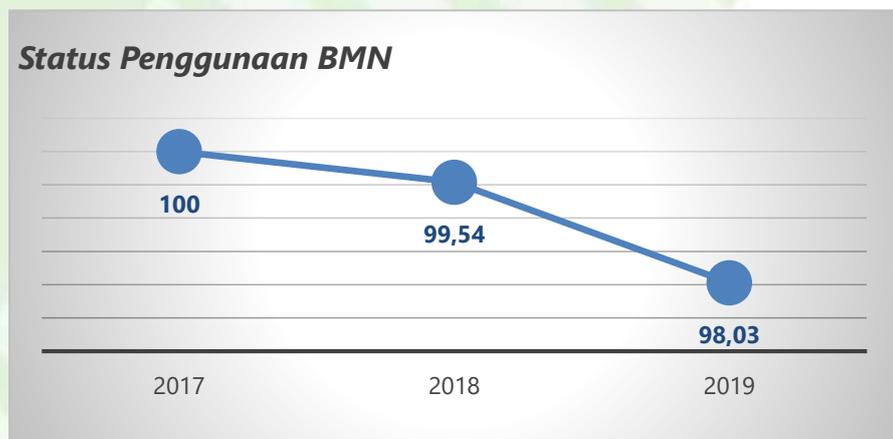
6. Jumlah Peserta KB Aktif Tambahan



Gambar 3.6. Grafik Perkembangan PA Tambahan

Jika melihat grafik diatas terlihat bahwa trend untuk Peserta KB Aktif Tambahan cukup fluktuaktif dimana mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2017 ke tahun 2018 namun pada tahun 2019 mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan karena tingkat *drop out* yang lumayan tinggi sehingga penambahan Peserta KB Baru (PB) tidak berdampak signifikan terhadap penambahan Peserta KB Aktif (PA). Sehingga Perwakilan BKKBN DIY perlu meningkatkan advokasi dan KIE dalam penggunaan alat kontrasepsi modern terutama yang bersifat jangka panjang (MKJP).

7. Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya



Gambar 3.7. Grafik Perkembangan Status Penggunaan BMN

Trend capaian pada indikator ini selama tiga tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh masih adanya pembelian BMN pada akhir tahun sehingga BMN tersebut belum dapat ditetapkan status penggunaannya hingga waktu yang telah ditentukan. Untuk mengatasi hal tersebut Perwakilan BKKBN DIY perlu menetapkan AJK untuk pembelian BMN di awal tahun dan dapat selesai pada triwulan I setiap tahunnya.

6) Analisis Program dan Kegiatan Dalam Mendukung Capaian Kinerja

Pencapaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta didukung dengan berbagai kegiatan sebagai berikut :

1. Program KKBPK di DIY
 - a. Sinkronisasi (penyerasian) Kebijakan Pembangunan Daerah dengan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Seluruh Tingkatan Wilayah
 - Penyusunan dokumen GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) 5 aspek/matra Kabupaten Gunungkidul
 - Penyusunan buku profil tematik kependudukan untuk 3 Kabupaten/Kota yakni Kabupaten bantul dan Kabupaten Gunungkidul
 - Penyusunan policy brief kajian analisis dan kajian model solusi dampak kependudukan.
 - Pembentukan 16 SSK tingkat SMP di Kabupaten Sleman
 - Monev SSK Tingkat SMA di 5 kabupaten/kota
 - Workshop penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) SSK untuk Kepala Sekolah dan Guru SSK tingkat SMA.

- Penguatan dan Pengembangan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB sebanyak 83 RDK.
- b. Pembinaan Kesertaan ber-KB dan Peningkatan Kualitas Pelayanan KB yang Sesuai dengan Standarisasi Pelayanan KB di Seluruh Tingkatan Wilayah
- Penggerakan KB MKJP sebanyak 2.397 peserta KB
 - Pelayanan Pencabutan Implant sebanyak 125 kasus
 - Pemenuhan ketersediaan alkon di 279 faskes
 - Pelayanan KB Bergerak secara gratis sebanyak 5 frekwensi untuk MOW dan MOP.
 - Distribusi dan Sosialisasi Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi berupa buku materi kesehatan kespro bagi kelompok kegiatan.
 - Deteksi Dini KAR Terintegrasi Pelayanan KB MKJP
 - Sosialisasi Materi Hindari 4 Terlalu
- c. Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga di Seluruh Tingkatan Wilayah
- Sosialisasi BKB dan 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) di Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo.
 - Gebyar Ketahanan Keluarga pada Hari Keluarga Provinsi di Kabupaten Kulon Progo
 - Gerakan pengasuhan Anak usia 6-10 tahun dalam rangka HAN
 - Workshop Penyiapan Perencanaan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja Putri Sebagai Calon Ibu Bagi Pengelola Genre dan Kelompok BKR Kab/ Kota
 - Penyelenggaraan Hari Remaja dan Jambore Ajang Kreatifitas (JAK) tingkat provinsi dengan melibatkan unsur Polresta, BNPB dan BPPM

- Dukungan Pembinaan kelompok PIK R dan BKR
 - Promosi PUP Pada Hari Remaja dan Moment Strategis Lainnya
 - Genre Fellowship dalam rangka Pemilihan Duta Genre
 - Pembentukan CoE BKL di 5 Kabupaten/Kota, disatu 1 CoE BKL Kabupaten Bantul diadakan Sekolah Lansia
 - Dukungan Pembinaan Kelompok BKL
 - Integrasi Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga Dengan Dinas Terkait
 - Dukungan ATTG Bagi Kelompok UPPKS
 - Pengembangan dan Sosialisasi Media KIE Penyiapan Generasi Emas Sesuai Kearifan Lokal
 - Pengembangan dan Sosialisasi Materi dan Media KIE Kelanjutusiaan Sesuai Kearifan Lokal
 - Gerakan Nasional Pendampingan Perawatan Jangka Panjang Berbasis Keluarga
- d. Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat di seluruh tingkatan wilayah yang mendapat pembinaan advokasi dan KIE Program KKBPK
- Pengembangan Materi dan Isi Pesan Advokasi Promosi dan KIE berupa pembuatan paket buku materi advokasi bagi Remaja
 - Sosialisasi, Advokasi dan KIE PPKBPK Bersama Mitra Kerja melalui KIE Medis dan Pelayanan KB di Rumah Sakit Hardjolutito
 - Pertemuan Kemitraan dengan Media massa Lokal Tk Provinsi dan Kabupaten/Kota
 - Advokasi dan Promosi Program KKBPK melalui Televisi, Radio, Sosial Media, Media Luar Ruang dan Lini Bawah

- Pertemuan Integrasi kampung KB bersama mitra kerja berupa kegiatan Monev Kesrak PKK KB Kesehatan di 5 (lima) Kab/Kota
- Peningkatan kapasitas bagi Pengelola Program KKBPK
- Forum jejaring kemitraan KKBPK
- Pengintegrasian Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan di Daerah berupa Kegiatan Monev TMKK KB Kesehatan bersama TNI, Polri, Dinas Kesehatan dan DP3AP2 DIY
- Peningkatan Kapasitas bagi PKB
- Pelaksanaan remedial sertifikasi bg PKB
- Pertemuan Koordinasi Profesi bagi IPeKB
- Penguatan dan Bimtek program KKBPK di kampung KB
- Pengembangan CoE Kampung KB Percontohan dari Target 5 Kampung KB per Kabupaten dapat terbentuk 9 CoE Kampung KB
- Pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia
- Peningkatan Teknis Pengelola Data SIGA bagi tenaga Faskes dan Tenaga Lini Lapangan di 5 Kabupaten/Kota
- Rapat Pengendalian Program dan Anggaran Tingkat Provinsi
- Sosialisasi Pendataan Keluarga bagi camat dan kepala desa se-DIY

2. Program Dukungan Manajemen Provinsi

- Pembayaran gaji dan uang makan pegawai.
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan kantor, seperti operasional langganan listrik, telepon, bandwidth, pemeliharaan gedung, bangunan dan halaman,

pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

- Penyusunan dokumen perencanaan program dan anggaran tahun 2019.
 - Fasilitasi Perencanaan DAK Subbidang KB Tahun Anggaran 2020
 - Asessment bagi pegawai
 - Rekonsiliasi (Penyamaan Data) laporan keuangan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN)
 - Fasilitasi penyusunan laporan keuangan
 - Penguatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Penyediaan sarana dan prasarana perkantoran, berupa PC, Printer, dan AC
3. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN
- Sosialisasi SPIP
 - Sosialisasi penerapan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK)
4. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
- a. Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)
 - Pelatihan Peningkatan Kompetensi Teknis bagi PKB/PLKB dengan peserta sebanyak 50 Orang
 - Pelatihan Pengelolaan Kampung KB Percontohan dengan peserta sebanyak 39 Orang
 - Pelatihan Pengelolaan SIGA dengan peserta sebanyak 29 Orang.
 - b. Hasil-Hasil Penelitian dan Pengembangan Program

- Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP) Tahun 2019.
- Sosialisasi Hasil SDKI 2017
- Kajian Penelitian Program KKBPK bekerjasama dengan sejumlah Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Seminar Kependudukan, Keluarga dan Sumber Daya Manusia dengan tema " Industri 4.0 Menuju Society 5.0 : Transformasi Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Menuju Indonesia Emas 2045 ".

7) Langkah – langkah ke depan

Sedangkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2019 sebagai upaya untuk meningkatkan capain kinerja dan memenuhi target jangka menengah Renstra adalah sebagai berikut :

1. Melakukan revitalisasi KIE dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran;
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK dan difokuskan pada wilayah wilayah dengan pencapaian PA rendah dan *Unmet Need* yang tinggi, melalui KIE dan pelayanan KB di daerah legok termasuk di desa wilayah Kampung KB dengan memanfaatkan analisis devinfo yang sudah dilakukan per kecamatan;

4. Mengintensifkan pelayanan KB Bergerak di wilayah DTPK melalui Baksos pelayanan KB MKJP yang terintergrasi dengan pelayanan papsmeas.
5. Mengintensifkan pembinaan program KKBPK baik untuk wilayah Kampung KB maupun wilayah di luar Kampung KB untuk mendorong capaian Program KKBPK. Mengintensifkan pemanfaatan berbagai media dalam menyebarluaskan program KKBPK

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2019 Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan program dan kegiatan mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp62.946.271.000,-. Anggaran ini lebih kecil dibandingkan dengan anggaran tahun 2018 yaitu sebesar Rp86.933.790.000,-. Mengalami penurunan sebesar Rp. 23.987.519.000,- atau 38,11%. Hal ini disebabkan oleh penurunan alokasi anggaran pada satker BKKBN secara nasional. Data berikut merupakan realisasi anggaran pada Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta per program

Tabel 3.7

Rincian Realisasi Anggaran (Dalam Ribuan Rupiah)

NO	PROGRAM	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5297	Pengelolaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Provinsi	61.459.151	49.364.963	80,32	50.555.002	47.457.356	93,89
5298	Pengelolaan Program pengawasan Provinsi	205.000	196.313	95,76	135.064	121.150	92,10

NO	PROGRAM	TAHUN 2018			TAHUN 2019		
		PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
5299	Pengelolaan Program Pelatihan dan Pengembangan Provinsi	3.748.659	3.368.212	89,85	1.598.595	1.542.743	96,54
3331	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi	21.520.980	14.029.261	65,48	10.657.610	8.061.509	75,65
Total Pagu Anggaran		86.933.790	66.896.318	76,95	62.946.271	57.182.758	90,84

Sumber data : Subbag. Keuangan dan BMN

Dari tabel di atas, menunjukkan realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 90,84%. Realisasi program terendah ada pada Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Provinsi yaitu 75,65%. Adapun penyebab rendahnya realisasi anggaran pada program tersebut karena terdapat kegiatan yang belum optimal pencapaiannya.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran masih terdapat hambatan dan kendala antara lain :

- a. Kekosongan KPA pada periode 1 Maret sampai dengan 1 Juli 2019 sehingga menyebabkan terhambatnya proses pelaksanaan anggaran dan kegiatan
- b. Kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai AJK hal ini menyebabkan rencana penarikan dana tidak dapat tersusun secara tepat sehingga masih ditemukan defiasi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA yang merupakan salah satu indikator dalam evaluasi pelaksanaan anggaran.

- c. Keterlambatan juknis dan spesifikasi teknis terkait pengadaan dari BKKBN pusat sehingga menyebabkan penumpukan realisasi pada akhir tahun anggaran.

C. Kinerja Dan Capaian Lainnya

Selain capaian kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2019, juga terdapat beberapa capaian lainnya yang telah dicapai oleh Perwakilan BKKBN DIY sampai dengan Tahun 2019. Capaian tersebut antara lain :

1. Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK)



Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK), GDPK merupakan rumusan perencanaan

pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima tahun) ke depan dan dijabarkan setiap 5 (lima) tahunan yang berisi tentang isu penting kependudukan saat ini, kondisi kependudukan yang diinginkan, program pembangunan kependudukan, roadmap pembangunan kependudukan yang meliputi pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran serta pengaturan penduduk dan pembangunan administrasi kependudukan.

Pada tahun 2019 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah tersusun GDPK di tingkat Provinsi dan 5 (lima) Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pengelola mapupun pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program kependudukan kedalam RPJMD. Dengan tersusunnya GDPK

sesuai dengan ketentuan yang diterapkan, maka upaya pembangunan kualitas manusia telah berada pada roadmap yang benar.

2. Sekolah Lansia

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan CoE kelompok BKL di DIY adalah pengembangan kegiatan yang ada di Kelompok BKL salah satunya adalah pembentukan



Sekolah Lansia. Sekolah Lansia terselenggara atas kerja sama anatar Perwakilan BKKBN DIY dengan IRL (Indonesia Ramah Lansia).

Pada tanggal 13 Oktober 2019 bertempat di Kelompok BKL Khusnul Khotimah, Dusun Munggur, desa Srimartani, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul diselenggarakan pencanangan dan pembukaan Sekolah Lansia di Kelompok BKL tersebut. Kegiatan tersebut diikuti oleh 50 orang lansia. Sekolah Lansia di Kelompok BKL Khusnul Khotimah ini merupakan percontohan yang dikemudian hari diharapkan dapat dilakukan di kelompok BKL lainnya di DIY.

3. Portal Bimasakti Bidang Pelatihan dan Pengembangan



Sebagai komitmen dalam penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan dan sebagai langkah awal dalam

mengembangkan *Knowledge Management* Bidang Pelatihan dan

Pengembangan sebagai *Corporate Learning Center*, maka dikembangkan portal bimasakti (<http://latbangdjogja.web.id>).

Portal ini berisi tentang Pelatihan Daring Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Repositori Institusi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Wiki Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Pancanaka Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, Konferensi Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dan SAKTI (Sarana Kediklatan Berbasis Teknologi Informasi) Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta yang berisi tentang Aplikasi Jadwal Pelatihan, Aplikasi Bank Soal Pelatihan, Aplikasi Evaluasi Pelatihan, Aplikasi Analisis Kebutuhan Pelatihan, Aplikasi Monitoring Pelatihan, Aplikasi Sertifikat Pelatihan.

4. Percontohan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (ZI WBK)



Perwakilan BKKBN DI. Yogyakarta merupakan salah satu dari 10 daerah percontohan yang diajukan untuk memperoleh Predikat ZI WBK tahun 2019.

Selanjutnya Perwakilan BKKBN DI. Yogyakarta pada tanggal 24 September 2019 mempresentasikan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Perwakilan BKKBN DI. Yogyakarta dihadapan Tim Penilai Eksternal yaitu dari Tim Penilai Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai Inovasi-inovasi yang telah dilakukan.

Dari hasil presentasi tersebut, 5 daerah percontohan terbaik dikunjungi langsung oleh Tim Penilai Kementerian Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melihat langsung pelaksanaan ZI WBK di lingkungan Perwakilan BKKBN DI. Yogyakarta

5. Pembentukan CoE BKL



Setelah dicanangkannya Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) Mugi Waras, Blendong, Sumbersari, Moyudan dan Kelompok BKL Khusnul Khotimah, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul

sebagai Center of Excellence (CoE) di tahun 2018, pada tahun 2019 dilanjutkan pencanangan CoE BKL di 3 Kabupaten/Kota yang lain.

Maksud dan tujuan dicanangkannya CoE BKL tersebut adalah sebagai tempat rujukan, percontohan dan pembelajaran bersama dalam mengelola keberlangsungan sebuah kelompok sekaligus proses pelaksanaan berbagai program atau kegiatan pendampingan Lansia, juga pengembangan akses dengan merangkul mitra kerja terkait.

6. Pembentukan CoE Kampung KB

Berdasarkan Road Map Pengembangan Kampung KB Percontohan



di tahun 2019, setiap Kabupaten/ Kota diharuskan memiliki 1 (satu) Kampung KB Percontohan, yang digunakan sebagai rujukan pembelajaran dan

Pemngembangan Program KKBPK di wilayah masing masing.

Kampung KB Percontohan Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dicanangkan di Ruang Indraprasta Sahid Raya Hotel Yogyakarta pada tanggal 27 Agustus 2019 oleh Asisten Sekretariat Daerah DIY Bidang Pemberdayaan Sumber-
daya Masyarakat, Ibu Dra. Arofa Noor Indriyani, M.Si yang mewakili Bapak Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dari target 5 (lima) Kampung KB Percontohan, Daerah Istimewa Yogyakarta telah memfasilitasi pembentukan dan Pencanangan kepada 9 (sembilan) Kampung KB Percontohan, yang meliputi :

No	Nama	Keterangan
1	Kampung KB Malangrejo	Desa Wedomartani, Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman
2	Kampung KB Sengir	Desa Sumberharjo, Kec. Prambanan Kabupaten Sleman
3	Kampung KB Ngalangombo	Desa Dadapayu Kecamatan Semanu Kabupaten Gunungkidul
4	Kampung KB Ngramang	Desa Kedungsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
5	Kampung KB Kroco	Desa Sendangsari Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
6	Kampung KB Mertosanan	Desa Potorono Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
7	Kampung KB Ceming	Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul
8	Kampung KB RW. 08	Kelurahan Rejowinangun Kec. Kotagede Kota Yogyakarta
9	Kampung KB RW. 12	Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Kota Yogyakarta

7. Pembentukan Kampung KB secara Mandiri oleh Bupati Kulon Progo & Bantul

Pada tahun 2019 Kabupaten Kulon Progo dan Bantul secara mandiri telah mencanangkan Kampung KB diluar roadmap yang ada dengan didasari pada keberhasilan program Kampung KB yang selama ini sudah berjalan.



Bupati Kabupaten Kulon Progo mencanangkan 3 (tiga) Kampung KB pada tanggal 20 September 2019, sedangkan Bupati Bantul mencanangkan 9 (Sembilan) Kampung KB pada tanggal 10 Oktober 2019.

Adapun Kampung KB yang dicanangkan tersebut diatas meliputi :

No	Nama Kampung KB	Dasar Pembentukan
1	Kampung KB Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo	SK Bupati Kulon Progo No. 336/ B/ 2019
2	Kampung KB Desa Banjararum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo	SK Bupati Kulon Progo No. 336/ B/ 2019
3	Kampung KB Desa Gulurejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo	SK Bupati Kulon Progo No. 336/ B/ 2019
4	Kampung KB Gilang Desa Baturetno Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul	SK Bupati Bantul No. 431 Tahun 2019
5	Kampung KB Singosaren III Desa Singosaren Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul	SK Bupati Bantul No. 431 Tahun 2019
6	Kampung KB Sampangan Desa Wirokerten Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul	SK Bupati Bantul No. 431 Tahun 2019
7	Kampung KB Pamotan Desa Jambidan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul	SK Bupati Bantul No. 431 Tahun 2019
8	Kampung KB Ngebleng Desa Tamanan	SK Bupati Bantul No. 431 Tahun 2019

No	Nama Kampung KB	Dasar Pembentukan
	Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul	
9	Kampung KB Galan Desa Tirtosari Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul	SK Bupati Bantul No. 431 Tahun 2019
10	Kampung KB Brajan Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul	SK Bupati Bantul No. 431 Tahun 2019
11	Kampung KB Pranti Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul	SK Bupati Bantul No. 431 Tahun 2019
12	Kampung KB Warungpring Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul	SK Bupati Bantul No. 431 Tahun 2019

8. Akreditasi A Bidang Latbang



Berdasarkan Peraturan Kepala BKKBN No. 10 tahun 2017 tentang Akreditasi Lembaga Diklat Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, maka

Bidang Pelatihan dan Pengembangan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan Akreditasi A sebagai Lembaga Diklat Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan keluarga dengan skor sebesar 96,92. Pencapaian ini merupakan satu-satunya Bidang Latbang dengan status Akreditasi A, diantara 34 Provinsi yang ada di Indonesia. Pencapaian Akreditasi A ini menjadikan Bidang Latbang Perwakilan BKKBN D.I. Yogyakarta menjadi satu-satunya lembaga diklat di perwakilan yang dapat menyelenggarakan berbagai jenis pelatihan dan melakukan pembinaan/pendampingan kegiatan pelatihan bagi lembaga diklat yang masih terakreditasi B atau yang belum terakreditasi.

9. Tingkat Maturitas SPIP Level 3,45



Penyelenggaraan SPIP Perwakilan BKKBN D.I Yogyakarta pada Tahun 2018 berada pada tingkat maturitas pada level terdefinisi atau 3 dari 6 tingkat maturitas SPIP. Pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas menghasilkan nilai maturitas SPIP sebesar 3,45.

Dengan tingkat maturitas terdefinisi, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP Perwakilan BKKBN DIY secara umum menunjukkan bahwa unit organisasi telah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur atas sebagian besar kegiatan pokok unit organisasi dan mendokumentasikannya secara konsisten.

10. Penghargaan Khusus Institusi Pemasang ILM

Perwakilan BKKBN DIY menerima penghargaan khusus sebagai institusi pemasang ILM dalam rangka Anugerah penyiaran DIY tahun 2018.



Ada 19 kategori yang dilombakan, termasuk di dalamnya 6 kategori khusus yang diberikan kepada televisi sistem stasiun jaringan yang menayangkan program lokal terbanyak, tokoh pemerhati penyiaran DIY, Lembaga peduli penyiaran, mitra strategis KPID DIY, mitra strategis Radio Komunitas dan Institusi Pemasang ILM.

11. Peringkat I Nasional Pelaksanaan SKAP

Puslitbang KB dan KS melakukan evaluasi pengumpulan data untuk menjamin kualitas data SKAP 2018. Terdapat beberapa kriteria dalam melakukan evaluasi, diantaranya adalah persentase responden menjawab instrumen/kuesioner penelitian secara valid yang telah ditetapkan dengan "status selesai diwawancara", waktu selesainya pelaksanaan pengumpulan data wawancara, banyaknya wawancara ulang karena ditolak oleh manajer data pusat, kelengkapan dokumen pendukung survei, persentase jawaban "Tidak tahu" pada pertanyaan unmet need, dan perhitungan age heaping untuk mengetahui potensi pencacah/enumerator menghindari umur 15 dan 49 tahun.

Dari semua kriteria tersebut, Pelaksanaan SKAP di Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan total nilai 950,5 poin dan berhasil menjadi peringkat satu dari tiga puluh empat provinsi di Indonesia. Hal ini sesuai dengan komitmen Bidang Latbang Perwakilan DIY dalam menjaga kualitas data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai sebuah tradisi yang harus selalu ditingkatkan.



Bab IV

Penutup

Pelaksanaan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, menyajikan informasi realisasi kinerja tahun 2019 dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, disertai analisis capaian serta analisis efisiensi penggunaan sumber daya sehingga dapat mencapai keberhasilan pencapaian program yang lebih tinggi dalam rangka evaluasi guna perbaikan di masa yang akan datang. Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mendukung pencapaian tujuan/sasaran strategis Renstra BKKBN periode tahun 2019.

A. Simpulan

1. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 yang masuk dalam kategori BAIK SEKALI {BIRU} dengan rentang pencapaian antara 101,47% s.d. 358,82% adalah :
 - 1) Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)
 - 2) Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi
 - 3) Persentase Peserta KB Aktif MKJP

- 4) Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan
- 5) Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus
- 6) Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan
- 7) Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota
- 8) Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK
- 9) Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana - PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas
- 10) Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan
- 11) Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan
- 12) Penilaian mandiri level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- 13) Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB
- 14) Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota
- 15) Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga

- 16) Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA
 - 17) Presentase peta kompetensi PNS
 - 18) Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi
2. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 yang masuk dalam kategori BAIK {HIJAU} dengan rentang pencapaian antara 94,33% s.d. 100% adalah :
- 1) Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah
 - 2) Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)
 - 3) Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)
 - 4) Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk
 - 5) Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah
 - 6) Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota
 - 7) Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah
 - 8) Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah

- 9) Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative
- 10) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)
- 11) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL
- 12) Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS
- 13) Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK
- 14) Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK
- 15) Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional
- 16) Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat
- 17) Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah
- 18) Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK
- 19) Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi
- 20) Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi
- 21) Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)
- 22) Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)
- 23) Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran

- 24) Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)
 - 25) Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)
 - 26) Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi
 - 27) Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK
 - 28) Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)
 - 29) Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan
 - 30) Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK
 - 31) Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu
 - 32) Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya
3. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 yang masuk dalam kategori CUKUP {KUNING} dengan rentang pencapaian antara 80% s.d. 86,83% adalah :
- 1) Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*modern contraceptive prevalence rate/mCPR*)
 - 2) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)
 - 3) Jumlah peserta KB Aktif tambahan
 - 4) Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes
 - 5) Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan

4. Capaian Kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 yang masuk dalam kategori KURANG {MERAH} dengan pencapaian sebesar 55,68% adalah Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP.

B. Langkah-Langkah ke Depan

Berdasarkan capaian kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019, langkah-langkah yang perlu dilakukan ke depan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan intensifikasi kegiatan KIE, Konseling dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB yang tepat sasaran; dengan menajamkan segmentasi sasaran kegiatan program KKBPK, terutama untuk penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) untuk tidak *drop out* penggunaan kontrasepsi yang selanjutnya dapat meningkatkan peserta KB aktif.
2. Melakukan pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB;
3. Mengimplementasi SPIP di Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta secara efektif dan efisien serta memperkuat peran pengawasan sebagai penjamin mutu (*quality assurance*) dan sebagai konsultan dalam rangka pencegahan terjadinya kesalahan/ penyimpangan;
4. Memantapkan kegiatan pembinaan, pemantauan dan evaluasi guna mempertahankan prestasi yang selama ini diraih, sehingga dapat saling berpengaruh secara positif.
5. Perlu dilakukan kajian dan evaluasi lebih lanjut dalam perencanaan kinerja yang terkait dengan penetapan sasaran, indikator kinerja dan

target agar indikator yang dari pusat tidak pas, sehingga target dapat mencerminkan kinerja Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

6. LKIP merupakan acuan yang tepat dalam perencanaan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang, sesuai dengan indikator utama(IKU). .

LAMPIRAN

1. Renstra 2015 – 2019 Perwakilan BKKBN DIY
<http://yogya.bkkbn.go.id/rencana-strategis/>
2. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)
<http://yogya.bkkbn.go.id/indikator-kinerja-kegiatan/>
3. Perjanjian Kinerja 2019 Perwakilan BKKBN DIY
<http://yogya.bkkbn.go.id/perjanjian-kinerja/>
4. Definisi Operasional Perjanjian Kinerja 2019
5. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2019
<http://yogya.bkkbn.go.id/rapk/>



RENCANA STRATEGIS

PERWAKILAN BKKBN DIY TAHUN 2015 - 2019



Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rencana Strategis (Renstra) Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2015 – 2019 telah selesai disusun tepat waktu. Rencana Strategi tersebut merupakan jabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 – 2019 yang memuat visi dan misi pemerintah 5 tahun ke depan.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya mempunyai tugas fungsi penyelenggaraan bidang keluarga berencana saja tetapi juga mencakup bidang penyerasian kebijakan kependudukan dan peningkatan penyediaan data informasi kependudukan. Penyusunan renstra ini mengacu kepada ketentuan dan pendekatan perencanaan nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional dengan menggunakan pendekatan Balance Score Card (BSC). RENSTRA Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2015 - 2019 merupakan dokumen perencanaan penting yang nantinya akan menjadi pedoman untuk peningkatan kinerja BKKBN dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan mitra kerja BKKBN di dalam menyelenggarakan Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

Demikian RENSTRA ini dapat tersusun berkat kerja sama dari semua tim penyusun, semoga RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan Program Pembangunan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, Desember 2018
Kepala,

Drs. Bambang Marsudi, MM

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
PERWAKILAN BKKBN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2015-2019

2.1 TUJUAN PERWAKILAN BKKBN DIY

Dalam rangka mendukung upaya BKKBN dalam mewujudkan 9 (sembilan) Agenda Prioritas (Nawa Cita) Kabinet Pemerintahan Gotong-royong, terutama pada Agenda ke 5 (lima) yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, maka Perwakilan BKKBN DIY menetapkan tujuan utama pembangunan KKBPK tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Memperkuat akses pelayanan KB dan KR yang merata dan berkualitas, terutama dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Kesehatan. Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan KR dimaksud diupayakan dapat dicapai melalui: (a) penetapan standar kualitas fasilitas kesehatan KB (pelayanan KB, mekanisme pembiayaan, pengembangan SDM, menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi dan persebaran klinik pelayanan KB di setiap wilayah, serta manajemen ketersediaan dan distribusi logistic alokon); (b) Pengembangan operasional pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang terintegrasi dengan SJSN Kesehatan; (c) peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian ber-KB serta penyediaan distribusi sarana dan prasarana; (d) penyediaan dan distribusi sarana dan prasarana serta alat dan obat kontrasepsi yang memadai di setiap fasilitas kesehatan yang melayani KB; (e) meningkatkan jejaring pelayanan KB (bidan praktek swasta, dokter praktek swasta, puskesmas pembantu, poliklinik desa, pos kesehatan desa) dan pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk KB dan KR.
2. Meningkatkan pembinaan peserta KB, baik menggunakan MKJP maupun Non-MKJP dengan memperhatikan efektivitas dan kelayakan medis hak reproduksinya (rasional, efektif dan efisien) dan meningkatkan penanganan KB pasca persalinan, pasca keguguran, serta penanganan komplikasi dan efek samping penggunaan kontrasepsi;
3. Meningkatkan pemahaman remaja mengenai Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dalam penyiapan kehidupan dalam berkeluarga melalui pengembangan kebijakan dan strategi yang komprehensif dan terpadu antar sector dan Kab/Kota.

2.2 SASARAN STRATEGIS PERWAKILAN BKKBN DIY

Untuk mencapai tujuan utama di atas Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut:

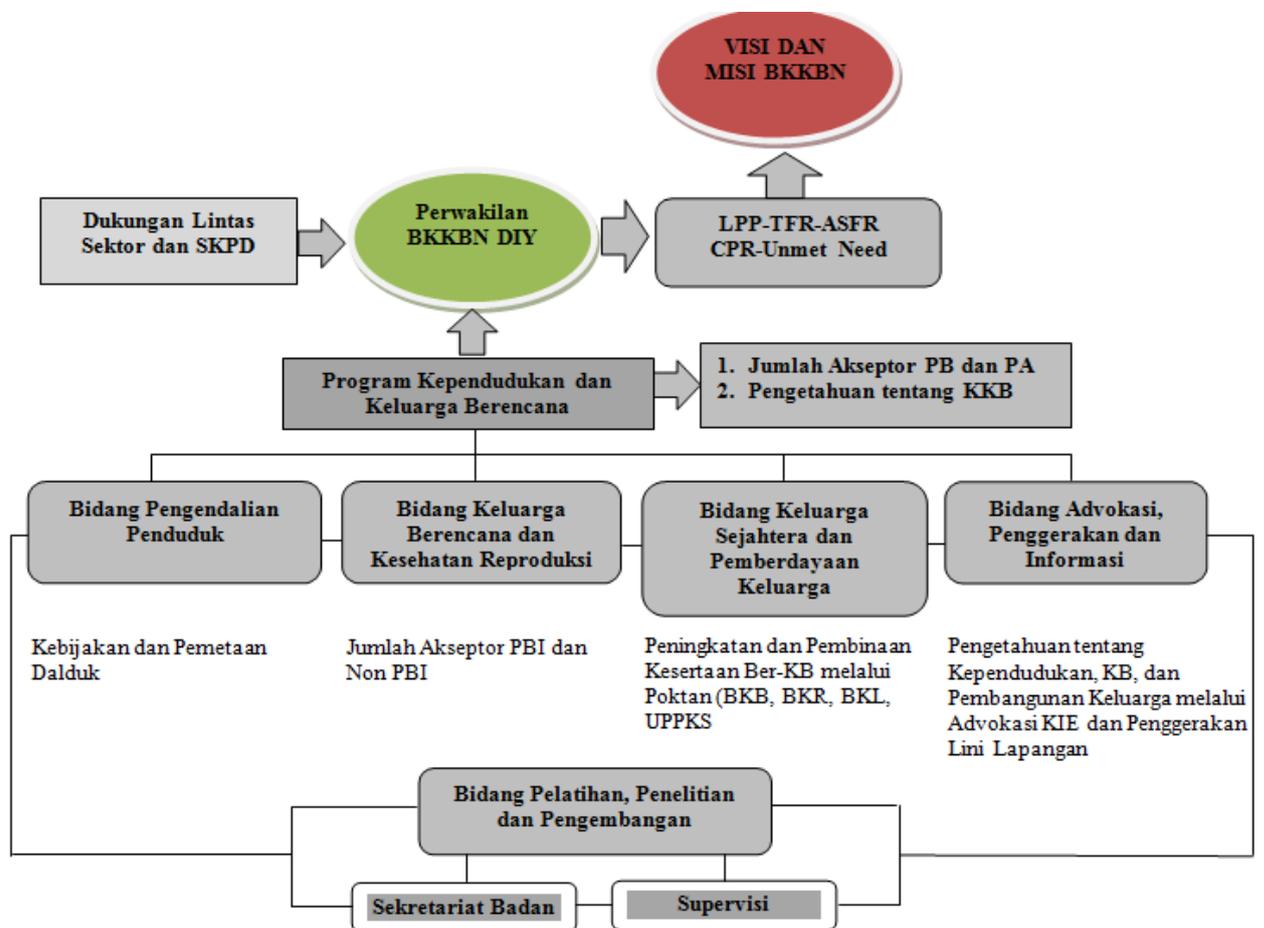
1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
4. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA PERWAKILAN BKKBN DIY

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 maka Perwakilan BKKBN DIY menyusun dan menetapkan Rencana Strategis BKKBN 2015-2019 dengan target kinerja dan kerangka pendanaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Gambar 4.1
Skema Struktur Program dan Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY
Tahun 2014-2015



Skema di atas merupakan skema struktur Program dan Kegiatan Perwakilan BKKBN DIY Tahun 2015-2019. Dalam skema tersebut digambarkan bahwa untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi BKKBN, Perwakilan BKKBN DIY menetapkan Sasaran Strategis (LPP, TFR, ASFR, CPR dan Unmetneed) dan mewujudkan sasaran tersebut dengan menyelenggarakan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana. Program tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh 4 (empat) bidang dengan masing-masing bidang memiliki indikator pencapaian sasaran program. Penyelenggaraan program KKBPK juga didukung oleh Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, serta Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas aparat Perwakilan BKKBN DIY.

4.1.1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN DIY

Sasaran strategis Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata sebagai cerminan atas keberhasilan pencapaian outcome melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Sebagai penjabaran tujuan strategis, Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan sasaran strategis tahun 2015-2019 sebagai berikut:

1. Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)
2. Meningkatnya Prevalensi Kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmetneed)
4. Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran, maka ditetapkan juga indikator tahunan dari Rencana Strategis Perwakilan BKKBN DIY 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis Perwakilan BKKBN DIY
Tahun 2015-2019

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
1 Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,10 (SDKI 2012)	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10
2 Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	59,60 (SDKI 2012)	62,28	62,48	62,69	62,89	63,10	63,10
3 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	11,50 (SDKI 2012)	10,69	10,57	10,35	10,23	10,00	10,00

INDIKATOR	BASELINE TARGET 2014	TARGET KINERJA					2015-2019
		2015	2016	2017	2018	2019	
4	Persentase Peserta KB Aktif MKJP 36,21 (SDKI 2012)	40,56	41,93	42,94	44,12	46,50	46,50
5	Persentase tingkat putus pakai kontrasepsi 27,00 (SDKI 2012)	25,90	25,61	25,21	24,91	24,51	24,51

4.1.2 Sasaran Kegiatan (*Output*) dan Indikator Kinerja Program

Sasaran kegiatan (*output*) merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis Perwakilan BKKBN DIY tahun 2015-2019. Sasaran dimaksud terdiri atas 1 (satu) Program teknis dan 3 (tiga) Program Generik sebagai berikut:

1. Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
2. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan;
3. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;serta
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Perwakilan BKKBN DIY.

4.1.2.1 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga

Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga adalah terlaksananya Program KKBPK diseluruh tingkatan wilayah. Untuk mengukur keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*), maka ditetapkan Indikator Kinerja Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga sebagai berikut:

1. Sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk.
2. Cakupan Pembinaan Kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB di seluruh tingkatan wilayah.
3. Pembinaan Pembangunan keluarga di seluruh tingkatan wilayah.
4. Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan.
5. Persentase petugas lini lapangan (PKB/PLKB) yang mendapat Dukungan Operasional Program KKBPK.
6. Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembanguann KKB di seluruh tingkatan wilayah.
7. Pengelolaan Data dan Informasi Program KKBPK di Provinsi.

4.1.2.2 Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan

Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Perwakilan BKKBN DIY adalah meningkatnya kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program serta Penelitian dan Pengembangan Program KKBPK. Untuk mengukur keberhasilan



**KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional perlu adanya penetapan peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Indikator Kinerja Tujuan dan Indikator Kinerja Utama BKKBN.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

11. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

18. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
19. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan

1. Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut Renstra BKKBN, merupakan dokumen yang memuat gambaran tentang mandat, tugas, fungsi dan kewenangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional serta peran, kondisi, tantangan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran strategis yang harus dicapai serta indikator *output*, indikator *outcome*, target capaian, pendanaan, dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
2. Indikator Kinerja Tujuan yang selanjutnya disebut dengan IKT adalah ukuran atau indikator yang digunakan oleh BKKBN untuk mengevaluasi Tujuan

BKKBN sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BKKBN tahun 2015-2019.

3. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut dengan IKU adalah ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis organisasi.
4. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
5. Sasaran Program merupakan hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis BKKBN tahun 2015-2019.
6. Sasaran Kegiatan adalah keluaran (*output*) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran program.
7. Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya disebut IKK adalah ukuran keberhasilan unit kerja dalam mencapai sasaran kegiatan (*output*).
8. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disebut dengan RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu.
9. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertugas dalam penyelenggaraan program Kependudukan dan Keluarga Berencana.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga adalah dokumen Rencana Keuangan Tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.
11. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih

tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

12. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja adalah dokumen pelaksanaan yang mencantumkan target setiap triwulan untuk digunakan sebagai tahap pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target kinerja yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja.
13. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
14. Laporan Kinerja adalah laporan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
15. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut SAKIP adalah serangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
17. Unit Kerja adalah unit organisasi tingkat Eselon I di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

BAB II

PENETAPAN KINERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penetapan kinerja di lingkungan BKKBN dilakukan melalui:

- a. penetapan IKT;
- b. penetapan IKU; dan
- c. penetapan IKK;

Bagian Kedua

Penetapan Indikator Kinerja Tujuan

Pasal 4

- (1) IKT merupakan ukuran atau indikator yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan organisasi.
- (2) IKT BKKBN periode RPJMN 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (3) Ukuran atau indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *impact*.

Pasal 5

- (1) Pengukuran IKT BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. Sensus Penduduk; atau
 - b. Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS);
- (2) Periode pengukuran IKT BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akhir periode RPJMN 2015-2019.

Bagian Ketiga
Penetapan Indikator Kinerja Utama;

Pasal 6

- (1) IKU merupakan ukuran keberhasilan organisasi yang terdiri dari:
- a. Sasaran Strategis; dan
 - b. Sasaran Program.
- (2) Sasaran strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ukuran pada tingkat organisasi.
- (3) Sasaran Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ukuran pada tingkat unit kerja eselon I.
- (4) IKU BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (5) Ukuran atau indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *outcome*.

Pasal 7

- (1) Pengukuran IKU BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dilakukan melalui:
- a. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI);
 - b. Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program (SKAP);
 - c. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS);
 - d. Pendataan Keluarga (PK); dan
 - e. Metode pengukuran lain yang ditentukan.
- (2) Periode pengukuran IKU BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.

Bagian Keempat
Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan;

Pasal 8

- (1) IKK merupakan ukuran keberhasilan unit kerja eselon II yang terdiri atas sasaran kegiatan.
- (2) Sasaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ukuran pada tingkat unit kerja eselon II.
- (3) IKK BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.
- (4) Ukuran atau indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *output*.

Pasal 9

- (1) Pengukuran IKK BKKBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dilakukan melalui:
 - a. Pendataan Keluarga (PK);
 - b. QPR (Quality, Process, Result) BSC BKKBN; dan
 - c. Metode pengukuran lain yang ditentukan.
- (2) Periode pengukuran IKK BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun.
- (3) Monitoring IKK BKKBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala.

BAB III

PELAKSANAAN PENETAPAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pasal 10

Tujuan Pelaksanaan Penetapan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan yang digunakan dalam penyusunan dokumen:

- a. rencana kinerja tahunan;
- b. rencana kerja dan anggaran;
- c. perjanjian kinerja;
- d. rencana aksi pencapaian kinerja;

- e. laporan kinerja; dan
- f. evaluasi pencapaian sasaran kinerja.

Pasal 11

Formulir penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 12

- (1) Pimpinan Unit Organisasi Tingkat Eselon I dan II di Lingkungan BKKBN harus melakukan penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun.
- (3) Hasil penyusunan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan.

BAB IV

PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Untuk meningkatkan efektifitas Pelaksanaan Penetapan Kinerja di Lingkungan BKKBN, maka kepada setiap Pejabat Tinggi Madya wajib melakukan pembinaan dalam pencapaian kinerja.

Pasal 14

Evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja dilakukan oleh Inspektorat Utama BKKBN.

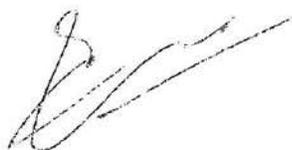
BAB V
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



f. SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR
KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN	TARGET 2019
1.	Mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan Keluarga Berkualitas	Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1.21

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,


SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2.31	2.28
2	Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/CPR)	61.1	61.3
3	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	10.14	9.91
4	Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4	Persentase peserta KB Aktif MKJP	22.30	23.50
5	Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi	5	Tingkat putus pakai kontrasepsi (%)	25	24.6

B. INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
1	Terlaksananya Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah peserta KB baru /PB (juta)	7,39	7,33
		2	ASFR 15-19 Tahun	40 per 1000 perempuan 15-19 tahun	38 per 1000 perempuan 15-19 tahun
		3	Persentase PUS yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi modern	50	70
		4	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang fungsi keluarga	40	50
		5	Indeks Pengetahuan remaja tentang Generasi Berencana	51	52
		6	Persentase masyarakat yang mengetahui tentang isu kependudukan	48	50
		7	Jumlah Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu	1	1

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
	2018			2019	
2	Terimplementasikannya Kebijakan Pengendalian Penduduk dalam Perencanaan Pembangunan	1	Jumlah Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD	34 provinsi; 240 Kab/Kota (43% dari 547 Kab/Kota); 35% K/L	34 provinsi; 300 Kab/Kota (54% dari 547 Kab/Kota); 40% K/L
3	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pelayanan KB dan KR	1	Jumlah PA Tambahan	1.150.000	965.000
		2	Persentase Peningkatan Kesertaan ber-KB di Daerah Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK)	48%	60%
4	Meningkatnya Ketahanan Keluarga guna mewujudkan Keluarga Berkualitas	1	Persentase Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS)	15,5%	15%
		2	Persentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi Ibu dan atau sedang hamil anak pertama	9,1%	9%
		3	Median Usia Kawin Pertama Perempuan	20,9	21
5	Meningkatnya Penghayatan Norma Keluarga Kecil	1	Persentase wanita usia subur yang mengadopsi norma anak ideal	65%	70%
		2	Persentase remaja yang mengadopsi norma Usia Kawin ideal	71%	72%
		3	Persentase potensial demand	13,7%	13,2%

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		4	Persentase Pemanfaatan data untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan	45%	60%
6	Tersedianya Dukungan Manajemen Dalam Rangka Penyelenggaraan Program KKBPK	1	Jumlah produk hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan KB	1	1
		2	Tingkat opini laporan keuangan oleh BPK	WTP	WTP
		3	Jumlah dokumen perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3	5
		4	Persentase terlaksananya pengembangan karir Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kompetensinya sesuai dengan standar (sesuai roadmap)	60% pengembangan SDM	63% pengembangan SDM
		5	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	4 dari skala 1-4	4 dari skala 1-4
		6	Jumlah Dukungan manajemen pengelolaan program Kependudukan, KB serta Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi	34 prov	34 prov

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		7	Tersedianya landasan hukum dan kebijakan yang sinergi dan harmonis antara pembangunan bidang kependudukan-KB dan bidang pembangunan lainnya	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program	Peraturan perundangan terkait dengan perkembangan program
		8	Persentase unit kerja yang melakukan tata kelola keuangan dan BMN yang memenuhi standar kepatutan	100%	100%
		9	Persentase unit kerja BKKBN yang melakukan perencanaan program dan anggaran yang sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan nasional	100%	100%
		10	Persentase pemetaan ASN BKKBN yang sesuai dengan standar kompetensi	100%	100%
		11	Persentase pelayanan kerumahtanggan & protokol, administrasi umum dan pengelolaan sarana & prasarana yang sesuai dengan standar	100%	100%
7	Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Program KKBPK	1	Persentase Temuan Penyimpangan Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Program KKBPK oleh eksternal audit	5 % (dari satker yang diaudit eksternal)	0 % (dari satker yang diaudit eksternal)

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		2	Jumlah pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di satker Perwakilan BKKBN provinsi	34 prov	34 prov
8	Meningkatnya efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pemanfaatan anggaran	1	Persentase penurunan temuan eksternal	50%	45%
		2	Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	90%	95%
		3	Persentase Satuan Kerja Mewujudkan Pembangunan Zona Intergritas Wilayah	90%	95%
9	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur Penyelenggara Program, Kerjasama Internasional serta Penelitian dan Pengembangan program KKBPK	1	Persentase peningkatan kualitas SDM Aparatur dan tenaga fungsional	90% SDM Aparatur	100% SDM Aparatur
		2	Jumlah Lembaga Diklat yang terakreditasi	1	1

NO	SASARAN PROGRAM/ SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		3	Jumlah kerjasama bilateral dan multilateral, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam dan luar negeri di bidang KKBPK	3	3
		4	Indeks Kepuasan hasil diklat nasional dan internasional, penelitian dan pengembangan KB, KS dan Kependudukan	3,3 (dari skala 1-4)	3,4 (dari skala 1-4)
		5	Jumlah pelaksanaan kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	34 prov	34 prov
10	Meningkatnya kualitas pelatihan dan pemanfaatan hasil penelitian untuk penentu kebijakan	1	Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam penentuan kebijakan program KKBPK	83	87
		2	Persentase tenaga program nasional yang terlatih	75%	80%
		3	Jumlah negara pengirim peserta program pelatihan internasional	20	21
		4	Persentase pegawai yang telah terpenuhi haknya mengikuti pelatihan kompetensi	62%	62%
		5	Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang Terakreditasi	1	1

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



 SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN III

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA

KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
1	Pengelolaan data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan sebagai Basis Perencanaan Pembangunan	1 Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan parameter kependudukan untuk penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan	14 (sektor)	16 (sektor)
		2 Persentase pemerintah Provinsi dan kab/kota yang menyediakan profil (parameter dan proyeksi) penduduk dalam melaksanakan perencanaan pembangunan daerah	Prov 100% Kab/kota 40%	Prov 100% Kab/kota 60%
		3 Jumlah Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian Penduduk	34 prov	34 prov
2	Terwujudnya kebijakan pembangunan yang berwawasan kependudukan pada semua	1 Persentase Pemda yang memasukkan indikator program KKBPK ke dalam RKPD	45% sektor; 30% provinsi; 25% Kab/Kota	50% sektor; 35% provinsi; 30% Kab/Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
	sektor di tingkat pusat, provinsi dan Kab/Kota	2	Persentase kabupaten/kota yang memiliki grand desain pembangunan kependudukan	90% kab/kota	100% kab/kota
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk	34 provinsi	34 provinsi
3	Meningkatnya sinergitas penyelenggaraan pendidikan kependudukan antar lembaga pendidikan	1	Persentase mitra kerja dan pengelola yang memiliki komitmen dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan kependudukan	100%	100%
		2	Persentase kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	100%	100%
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Pendidikan Kependudukan	34	34
4	Tersedianya kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis	1	Jumlah kebijakan pengendalian dampak kependudukan dan model solusi strategis dampak kependudukan sebagai rekomendasi pembangunan wilayah	6	6
		2	Jumlah kabupaten/kota/sector yang menginternalisasi kebijakan pengendalian dampak kependudukan ke dalam perencanaan program dan kegiatan	10 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	14 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pengendalian dampak kependudukan	10 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor	13 Provinsi, 110 Kab/Kota, 6 Sektor

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
5	Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB melalui Faskes KB pemerintah	1	Persentase peserta KB bagi PUS yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) melalui SJSN Kesehatan	54,5	55
		2	Persentase Faskes Jalur Pemerintah yang Bekerjasama dengan BPJS Kesehatan yang Memenuhi Standar Pelayanan KB (15.798 faskes pemerintah)	81,7%	100%
		3	Persentase faskes yang mendapatkan pemenuhan sarana, alokon sesuai dengan standar pelayanan KB (85% dari 53.342 Faskes yang diasumsikan bekerjasama dengan SJSN Kesehatan sampai dengan tahun 2019 = 45.340 Faskes s/d tahun 2019)	71,1%	85%
		4	Persentase Faskes yang Mendapat Sarana Pelayanan KB (Jumlah faskes pemerintah dan swasta yang terpenuhi sarannya dibandingkan dengan target faskes yang harus dipenuhi sarannya pada 2019 = 45.340 faskes)	86,6%	100%
		5	Jumlah fasilitasi pembinaan kesertaan ber-KB Jalur Pemerintah	12 kali di setiap provinsi	12 kali di setiap provinsi
		6	Jumlah pembinaan, monitoring dan evaluasi KB Jalur Pemerintah yang berkualitas	34 provinsi	34 provinsi
6	Meningkatnya kapasitas tenaga kesehatan pelayanan KBKR yang terstandarisasi	1	Persentase faskes dan jejaringnya yang memiliki tenaga kesehatan terstandarisasi/kompeten dalam pelayanan KB dan KR (1 faskes yang	66%	85%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		1	sudah bekerjasama dengan SJSN Kesehatan memiliki 1 dokter dan atau 1 bidan terstandarisasi/kompeten)		
		2	Persentase Faskes swasta yang terakreditasi/rekognisi yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan memberikan pelayanan KB	30%	50%
		3	Persentase Peserta KB (PBI dan non PBI) yang dilayani di Faskes Swasta dan jejaringnya	64,5%	66%
		4	Persentase terlaksananya pembinaan, monitoring dan evaluasi KB Jalur Swasta yang berkualitas	100%	100%
7	Meningkatnya pembinaan kesertaan KB di wilayah dan sasaran khusus	1	Persentase kabupaten (Kabupaten Galciltas) dan kota (Wilayah Miskin Perkotaan) yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB	48% Kab Galciltas dan 55% Wilayah Kota	60% Kab Galciltas dan 65% Wilayah Kota
		2	Persentase Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) dan wilayah miskin perkotaan yang difasilitasi dalam pembinaan kesertaan ber KB	48% Kab dan 55% Kota	60% Kab dan 65% Kota
		3	Jumlah fasilitasi pembinaan KBKR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan, dan Sasaran Khusus (KB Pria)	34 Provinsi	34 Provinsi

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
8	Meningkatnya Kualitas Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	1	Persentase faskes KB yang memiliki tenaga pelayanan KB yang memenuhi standar dalam melaksanakan promosi dan konseling kesehatan dan hak-hak reproduksi yang berkualitas	66% dari 53.342 faskes	85% dari 53.342 faskes
		2	Persentase Faskes yang memberikan informasi Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi	66% dari 53.342 faskes	85% dari 53.342 faskes
		3	Persentase Kelompok Sasaran (poktan/BKB-BKRBKL-UPPKS dan PPKS) yang mendapatkan promosi dan konseling kesehatan, serta hak-hak reproduksi yang berkualitas (memenuhi standar)	20% dari 265.045 poktan	25% dari 265.045 poktan
		4	Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) yang mendapatkan informasi kesehatan reproduksi	20% dari 265.045 poktan	25% dari 265.045 poktan
		5	Jumlah fasilitasi pembinaan, Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi	34	34
9	Meningkatnya Pengetahuan, Sikap dan Perilaku (PSP) keluarga balita dan anak dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1	Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak	65,5%	70,5%
		2	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB	65,5%	70,5%
		3	Persentase PUS anggota BKB yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	80%	80%
		4	Persentase Kelompok BKB HI yang mendapat pembinaan KKBPK	15%	17,5%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		5	Jumlah monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Bina Keluarga Balita yang berkualitas	34	34
10	Meningkatnya remaja yang mendapatkan pembinaan tentang Generasi Berencana (GenRe)	1	Indeks Pengetahuan Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) melalui Generasi Berencana (GenRe)	51	52
		2	Indeks pengetahuan remaja tentang Kesehatan Reproduksi	51	52
		3	Persentase PUS anggota BKR yang ber KB	75,5%	76%
		4	Persentase remaja yang mengakses PIK (dari yang pernah mendengar tentang PIK)	28%	30%
		5	Jumlah fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi Bina Ketahanan Remaja	34 prov	34 prov
11	Meningkatnya PSP keluarga lansia dan rentan dalam pembinaan keluarga lansia dan rentan	1	Persentase Keluarga yang mempunyai Lansia dan Rentan yang memahami tentang Pembinaan Ketahanan Keluarga Lanjut Usia & Rentan	9%	10%
		2	Persentase Keluarga yang Memiliki Lansia Ikut BKL	8%	8%
		3	Persentase PPKS yang Memberikan Pelayanan Komprehensif	45%	50%
		4	Jumlah fasilitasi pembinaan BKL dan PPKS yang berkualitas	34	34
12	Meningkatnya pemberdayaan ekonomi KPS melalui kelompok UPPKS dalam pembinaan ber KB	1	Persentase PUS KPS anggota kelompok UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB	71,5%	72,5%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		2	Persentase keluarga pra sejahtera yang menjadi anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Kejahtera (UPPKS)	54,9%	55,4%
		3	Persentase kelompok UPPKS yang mendapat bantuan permodalan	82,2	90,2
		4	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang berkualitas	34	34
13	Meningkatnya komitmen stakeholders (pemangku kepentingan) dan mitra kerja serta meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap program KKBPK	1	Persentase stakeholder dan mitra kerja yang mendapatkan advokasi melalui media, audiensi, dan momentum KKBPK	88	90
		2	Persentase stakeholders/pemangku kepentingan tingkat pusat maupun provinsi dan kabupaten kota yang terpapar program KKBPK	88	90
		3	Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang, terutama media lini bawah (poster, leaflet, lembar balik, banner, media tradisional)	80	82
		4	Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKBPK dari berbagai media	30	50
		5	Persentase PUS, WUS, remaja dan keluarga yang mendapatkan informasi program KKBPK melalui tenaga lini lapangan	69,1	79,1

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		6	Persentase masyarakat yang memahami isi pesan program KKBPK dari tenaga lini lapangan	69,1	79,1
14	Meningkatnya komitmen dan peran serta stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah yang mendukung operasional program KKBPK	1	Persentase kerjasama antara BKKBN dengan stakeholder dan organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dan daerah dalam implementasi program KKBPK	70%	80%
		2	Persentase mitra kerja melaksanakan program KKBPK	70%	80%
		3	Persentase pemerintah kabupaten dan kota yang mempunyai komitmen program KKBPK (kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, sarana prasarana, dan SDM)	80%	90%
		4	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi penguatan komitmen Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam penggerakkan operasional program KKBPK	34	34
15	Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga Penyuluh KB (PKB/PLKB) dalam pengelolaan program KKBPK	1	Persentase Kab dan Kota yang mempunyai Jumlah PLKB/PKB sesuai ratio yg memadai (1:2 ideal)	60%	70%
		2	Jumlah SDM Lini Lapangan yang Kompeten	882	882
		3	Persentase SDM Lini Lapangan yang terampil melaksanakan tupoksi	80%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		4	Persentase Tenaga PKB/PLKB yang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan standarisasi kompetensinya	70% dari jml PKB/PLKB	100% dari jml PKB/PLKB
		5	Persentase PKB/PLKB yang tersertifikasi	70%	100%
		6	Persentase pelaksanaan fasilitasi Peningkatan Pembinaan program KKBPK di Lini lapangan	100% jml provinsi	100% jml provinsi
		7	Jumlah Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Lini lapangan	34	34
16	Tersedianya Sistem Infomasi Keluarga program KKBPK berbasis TI sebagai pusat data informasi BKKBN	1	Jumlah data dan informasi program KKBPK yang tersedia secara cepat, tepat, akurat, dan bermanfaat berbasis teknologi informasi	17	17
		2	Jumlah mitra kerja dan stakeholders yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi program KKBPK	26	26
		3	Indeks kepuasan pemanfaatan data dan informasi KKBPK (oleh mitra kerja, masyarakat umum, internal BKKBN, Pemangku kepentingan)	3 dari skala 4	4 dari skala 4
		4	Jumlah tenaga pengelola yang kompeten dalam pengelolaan data dan informasi program KKBPK	591 orang	591 orang
		5	Jumlah Pembinaan, monitoring dan evaluasi, serta fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi yang berkualitas	19	19
17	Tersedianya layanan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (STIK)	1	Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK	4 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		2	Indeks Kepuasan Layanan terhadap pemanfaatan STIK	4 dari skala 1-5	4 dari skala 1-5
		3	Persentase Fasilitasi Pengelolaan Data dan Informasi	100%	100%
18	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	34 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
		2	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	85% Kab/Kota	100% Kab/Kota
		3	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	34 provinsi (85% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
		4	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	85% Kab/Kota	100% Kab/Kota
		5	Persentase Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	110 Kab/Kota	110 Kab/Kota

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		6	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	34	34
		7	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	34	34
		8	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)	34 provinsi (100% dari jumlah kab/Kota)
		9	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	Additional Users (PA tambahan): 965.000	Additional Users (PA tambahan): 744.000
		10	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/ kab	3 frek/th/ kab
		11	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	71,1	85
		12	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	66%	85%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
		13 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	100% Kab/Kota	100% Kab/Kota
		14 Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	33 Prov dan 547 Kab/Kota	33 Prov dan 547 Kab/Kota
		15 Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	34 Prov dan 514 Kab/Kota	34 Prov dan 514 Kab/Kota
		16 Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100%	100%
		17 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100%	100%
		18 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100%	100%
		19 Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100%	100%
		20 Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	100%	100%
		21 Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang	70%	80%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
		mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK		
		22 Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	34	34
		23 Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional		
		24 Persentase petugas lini lapangan (PLKB/PKB) yang mendapat Dukungan Operasional program KKBPK	100	100
		25 Jumlah Penggerakan Pembinaan KKBPK bagi PKB/PLKB dan mitra kerja di setiap tingkatan wilayah	34	34
		26 Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	34	34
		27 Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	34 prov dan 547 kab/kota	34 prov dan 547 kab/kota
		28 Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100%	100%
		29 Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)	2 jenis data dan informasi di setiap prov (keluarga, RR)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
		30 Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	34	34
19	Tersedianya Landasan hukum dan kebijakan yang dapat dipergunakan sebagai dasar penguatan pelaksanaan program KKBPK	1 Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang terfasilitasi dan Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten/Kota	1	1
		2 Jumlah regulasi/kebijakan program KKBPK	10	5
		3 Jumlah pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam penataan Hukum, Organisasi dan Humas	34	34
20	Terwujudnya pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel untuk mencapai tingkat opini WTP	1 Persentase Laporan Keuangan & BMN yang dapat diselesaikan tepat waktu, akuntabel, kredibel dan memenuhi standar kepatutan	100%	100%
		2 Jumlah satker yang melaksanakan tata kelola keuangan dan BMN sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan peraturan perundang undangan	42	42
		3 Persentase Satuan Kerja yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan dengan tingkat akurasi yang dapat dipertanggungjawabkan	100 %	100 %
		4 Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai peraturan perundangan	100%	100%
		5 Persentase Barang Inventaris Tercatat pada SIMAK BMN di semua tingkatan yang kredibel	100%	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
		6	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan BMN yang dilaksanakan	42 Satuan kerja	42 Satuan kerja
21	Terlaksananya perencanaan program dan anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	1	Jumlah Perencanaan Program dan Anggaran yang mengacu pada pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan berbasis kinerja	3	4
		2	Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang merencanakan program dan anggaran yang berkualitas	62	62
		3	Jumlah unit eselon II pusat dan provinsi yang melaksanakan program dan anggaran sesuai dengan dokumen perencanaan	62	62
22	Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian tepat waktu dan pengembangan SDM Aparatur yang kompeten	1	Persentase Pengelolaan SDM Aparatur Sipil Negara yang Optimal	100	100
		2	Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan kepegawaian	3 (skala 1-5)	4 (skala 1-5)
		3	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang Efektif dan Efisien	90	100
		4	Jumlah fasilitasi Pengelolaan Administrasi Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	34 (1pusat, 33 prov)	34 (1pusat, 33 prov)
23	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran,	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Kerumahtanggaan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR		TARGET	
				2018	2019
	kerumahtanggaan dan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran	2	Indeks kepuasan terhadap pelayanan kerumah tanggaan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		3	Indeks Kepuasan Pelayanan Pemeliharaan Sarana Prasarana Perkantoran	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		4	Indeks kepuasan terhadap pelayanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		5	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Keprotokolan dan Keamanan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		6	Indeks kepuasan terhadap pelayanan administrasi perkantoran, keprotokolan dan keamanan	skala 4 (1-4)	skala 4 (1-4)
		7	Jumlah fasilitasi, pembinaan dan evaluasi	12	12
		24	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi	1	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)
2	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)			100	100
3	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran			12	12
4	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)			12	12
25	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah I	1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I	14 Satker	14 Satker
		2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan I	50%	45%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	90%	95%
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	90%	95%
		5	Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah I	14 dok	14 dok
26	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah II	1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II	14 Satker	14 Satker
		2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan II	50%	45%
		3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	90%	95%
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	90%	95%
		5	Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah II	14 dok	14 dok
27	Terlaksananya pelaksanaan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pengelolaan program KKBPK di wilayah III	1	Jumlah laporan hasil pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III	14 Satker	14 Satker
		2	Persentase penurunan temuan audit internal wilayah pengawasan III	50%	45%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		3	Persentase unit kerja yang telah menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	90%	95%
		4	Persentase unit kerja yang mendapatkan fasilitasi pembangunan Zona Integritas wilayah bebas dari korupsi	90%	95%
		5	Jumlah fasilitasi pengawasan pengelolaan program KKBPK di wilayah III	14 dok	14 dok
28	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi	1	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	34	34
		2	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	34	34
29	Meningkatnya kesertaan pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur Kependudukan dan KB	1	Persentase SDM Tenaga Pegawai BKKBN dan Tenaga Program Meningkatkan Kualitasnya	75%	80%
		2	Persentase SDM Tenaga Pegawai dan Tenaga Program yang mengikuti pelatihan	75%	80%
			Jumlah Balatbang dan UPT. Balai Diklat yang terfasilitasi untuk akreditasi	1	1
30	Meningkatkan SDM Aparatur dan mitra kerja yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Internasional serta penguatan kerjasama Internasional	1	Jumlah SDM Aparatur yang Meningkatkan Kualitasnya Melalui Program Pendidikan ke Luar Negeri	40	40
		2	Jumlah SDM Aparatur dan Mitra Kerja yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri	55	61

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET		
			2018	2019	
		3	Jumlah Kerjasama Internasional yang dapat Diimplementasikan	6	6
31	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan KB dan KS	1	Hasil Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	17	18
		2	Tingkat kepuasan pengguna (user) terhadap hasil penelitian KB dan KS	3,2 (skala 1-4)	3,3 (skala 1-4)
		3	Jumlah Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan KB dan KS	34	34
32	Tersedianya data dan informasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan	1	Hasil Penelitian dan Pengembangan Kependudukan	16	17
		2	Tingkat Kepuasan Pengguna (user) terhadap Hasil Penelitian (Indeks)	3,3 (skala 1-4)	3,5 (skala 1-4)
33	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi	1	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh	2.700 Pegawai Prov dan 17.294 Fungsional Penyuluh
		2	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	14996	15995
		3	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	
			2018	2019
		4 Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3	3

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

A. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

**CONTOH FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA**

Kementerian/Lembaga Provinsi/Kab/Kota : (a)
Tahun : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. **Header (a)** diisi nama kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota;
2. **Header (b)** diisi dengan tahun anggaran;
3. **Kolom (1)** diisi dengan sasaran strategis kementerian/lembaga/pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. **Kolom (2)** diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari kementeria/lembaga/ pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam kolom (1); dan
5. **Kolom (3)** diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.

B. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

**CONTOH FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I**

Unit Eselon I Kementerian/Lembaga / SKPD : **(a)**
Tahun : **(b)**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. **Header (a)** diisi nama unit organisasi eselon I kementerian/lembaga/SKPD;
2. **Header (b)** diisi dengan tahun anggaran;
3. **Kolom (1)** diisi dengan sasaran strategis unit organisasi eselon kementerian/lembaga/SKPD sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. **Kolom (2)** diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari unit organisasi eselon kementerian/lembaga/SKPD dalam kolom (1); dan
5. **Kolom (3)** diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran

C. FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

**CONTOH FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II**

Unit Eselon II/Unit Mandiri KL : **(a)**
Tahun : **(b)**

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

Petunjuk Pengisian:

1. **Header (a)** diisi nama unit organisasi eselon II/ Unit Mandiri kementerian/lembaga;
2. **Header (b)** diisi dengan tahun anggaran;
3. **Kolom (1)** diisi dengan sasaran strategis unit unit organisasi eselon II/ Unit Mandiri kementerian/lembaga sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
4. **Kolom (2)** diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari unit organisasi eselon II/ Unit Mandiri kementerian/lembaga dalam (1); dan
5. **Kolom (3)** diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran.

PETUNJUK PENGISIAN

KOLOM	DIISI DENGAN
1	Nomor urut
2	Diisi sasaran strategis Renstra BKKBN 2015-2019 (revisi)
3	Diisi indikator kinerja dalam Kontrak Kinerja Pusat/Provinsi
4	Diisi sasaran kinerja dalam Kontrak Kinerja Pusat/Provinsi
5	Diisi dengan target pencapaian kinerja dengan membagi menjadi target triwulanan. Untuk target yang hanya bisa diukur pada akhir tahun maka hanya diisi pada triwulan IV. Target triwulanan adalah target absolut. Jika masih bentuk persentase maka
6	Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki korelasi terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan DIPA masing-masing komponen tahun 2018. Pemilihan kegiatan didasarkan pada kewajaran aktivitas tersebut dalam mendukung tercapainya pencapaian Kontrak Kinerja Pusat/Provinsi
7	Diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada masing-masing kegiatan kolom 6, jumlah anggaran tidak harus sama
8	Diisi dengan penanggung jawab kegiatan pada kolom 6
9	Diisi dengan alokasi jadwal kegiatan

Catatan: Untuk kegiatan manajerial yang menjadi Indikator Strategis di Luar Renstra dalam Kontrak Kinerja Pusat dan Provinsi agar mengacu pada kegiatan/aktivitas yang sudah dirinci di Kolom 6

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2018

PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



SIGIT PRIOHUTOMO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohdhiana Sumariati
Jabatan : Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi D.I. Yogyakarta

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Hasto Wardoyo
Jabatan : Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019

Pihak Pertama,

Rohdhiana Sumariati



PERWAKILAN BKKBN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
A INDIKATOR SASARAN STRATEGIS				
1	Menurunnya angka kelahiran total (TFR)	1	Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) per WUS (15-49 tahun)	2,18
2	Meningkatnya prevelensi kontrasepsi modern (mCPR)	2	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR)	61,95
3	Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi	3	Persentase penurunan angka ketidakberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) kontrasepsi	24,60
4	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmetneed)	4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,23
5	Meningkatnya peserta KB Aktif yang menggunakan MKJP	5	Persentase Peserta KB Aktif MKJP	32,42
6	Meningkatnya peserta KB Aktif tambahan	6	Jumlah Peserta KB Aktif tambahan (Additional User)	3.767
B INDIKATOR KINERJA RENSTRA				
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga				
7	Terlaksananya Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah			
Pengendalian Penduduk Provinsi				
		7	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	100% (5 Kab/Kota)
		8	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	100,00
		9	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	34
		10	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	3 Model (terdiri dari 1 formal, 1 non formal, 1 informal)
		11	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	1
Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi				
		12	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	100,00
		13	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	4,352
		14	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	3 frek/th/kab
		15	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	85,00
		16	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	85,00
		17	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	1
Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi				
		18	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsiinsi dan 5 Kab/Kota
		19	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsiinsi dan 5 Kab/Kota
		20	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	100,00

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
		21	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	100,00
		22	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	100,00
		23	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	100,00
		24	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	1
Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi				
		25	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	80,00
		26	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	1
		27	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	5 Media
		28	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat	5
		29	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah	1 Provinsi dan 5 Kab/Kota
		30	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	100,00
		31	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	2
		32	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	1
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya				
8	Terselenggaranya Dukungan Manajemen dalam pengelolaan Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Provinsi			
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi				
		33	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	13 bulan 1 Provinsi
		34	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	100,00
		35	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	12
		36	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	12
		37	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	100,00
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur				
9	Terwujudnya akuntabilitas pelaksanaan pengawasan lainnya di provinsi			
V Pengawasan Provinsi				
		38	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparaturnya di provinsi	1
		39	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	1
Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional				
10	Terselenggaranya kegiatan pelatihan, penelitian dan pengembangan di Provinsi			
VI Pelatihan Pengembangan Provinsi				
		40	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	98
		41	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	1
VII Penelitian dan Pengembangan Provinsi				
		42	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	3 Dokumen penelitian (KKBPK dan RPJMN) / Prov
		43	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	3

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019
C PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)				
11	Tersedianya Alokasi di Fasilitas Kesehatan	44	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	323
12	Terlaksanannya promosi dan konseling kesehatan reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	45	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	1.859
13	Meningkatnya pengetahuan keluarga yang memiliki Baduta tentang 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	46	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	35.435
14	Meningkatnya pengetahuan Remaja Putri sebagai calon ibu tentang edukasi Kespro dan Gizi melalui peran Pusat Informasi Konseling (PIK) Remaja dan Bina Ketahanan Remaja (BKR)	47	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	418
D INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA				
15	Terlaksanannya penetapan BMN berdasarkan status penggunaannya	48	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	100,00
16	Meningkatnya akuntabilitas kinerja program dan anggaran	49	Level maturitas penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3.4 (Level 1-5)
17	Meningkatnya pengelolaan Kampung KB melalui Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	50	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	65,00
18	Terbentuknya Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	51	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	5
19	Terlaksanannya Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Komprehensif di Kecamatan oleh Kabupaten dan Kota	52	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	50,00
20	Terdatanya Kepala Keluarga (KK) dalam Pendataan Keluarga	53	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	100,00
21	Meningkatnya cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	54	Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	50,00
22	Meningkatnya kualitas SDM Aparatur sesuai dengan kompetensinya	55	Persentase peta kompetensi PNS	60,00
		56	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	3.0 (Skala 1-5)

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN/BIDANG/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)	
1	Pengelolaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga Provinsi D.I. Yogyakarta	1	Pengendalian Penduduk Provinsi	791.267.000
		2	Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi	1.548.022.000
		3	Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi	1.239.740.000
		4	Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi	4.103.601.000
		5	Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi	50.555.002.000
		6	Pengawasan Provinsi	135.064.000
		7	Pelatihan Pengembangan Provinsi	812.216.000
		8	Penelitian dan Pengembangan Provinsi	786.379.000
2	Proyek Prioritas Nasional	9	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	1.214.063.000
		10	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	112.500.000
		11	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	350.000.000
		12	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	1.298.417.000
		TOTAL ANGGARAN		62.946.271.000

Kepala Badan Kependudukan
Dan Keluarga Berencana Nasional,



Hasto Wardoyo

Surabaya, 16 September 2019
Plt. Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi D.I. Yogyakarta,



Rohdhiana Sumariati

**DEFINISI OPERASIONAL, SATUAN, ALAT UKUR, PERIODE PENGUKURAN DAN PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA PUSAT DAN PROVINSI TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	ALAT UKUR	PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
PERWAKILAN BKKBN PROVINSI						
Bidang Pengendalian Penduduk Provinsi						
1	Jumlah cakupan sinkronisasi (penyerasian) kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk diseluruh tingkatan wilayah	Persentase kab/kota yang telah menyusun dokumen <i>Grand Design</i> Pembangunan Kependudukan (GDPK) dibandingkan dengan total kab/kota di suatu Provinsi	Provinsi	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITJAKDUK
2	Persentase Kab/Kota yang mengimplementasikan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (Grand Design, Profil/parameter dan Proyeksi Penduduk)	Persentase kab/kota yang menyusun GDPK atau parameter atau profil Program KKBPK	Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITRENDUK
3	Jumlah Kabupaten/Kota yang memanfaatkan Analisis Dampak Kependudukan sebagai pendukung kebijakan Pembangunan berwawasan kependudukan	Jumlah Rumah Data Kependudukan yang terbentuk di Kampung KB yang tersebar di minimal 22% Kab/Kota di setiap provinsi	Rumah data kependudukan di Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITDAMDUK
4	Jumlah pembinaan implementasi pendidikan kependudukan di Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota (formal, non formal, informal)	<p>Jalur Formal</p> <p>1. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)</p> <p>a. Pembentukan Model SSK dan Pojok Kependudukan di Jenjang Pendidikan SD/MI, SLTP/MTs, SMA/MA atau yang Sederajat di setiap Kab/Kota (Target @ 1 Sekolah/Madrasah di setiap Kab/Kota sesuai dengan jenjangnya).</p> <p>Catatan:</p> <p>1. Masing-masing Provinsi diharapkan memfokuskan pada jenjang pendidikan SMP dan SMA</p> <p>2. Bagi Provinsi yang memiliki jumlah Kab/Kota terlalu banyak dengan sumber daya yang terbatas dapat dilakukan secara bertahap.</p> <p>3. Bagi Provinsi yang setiap Kab/Kota sudah terbentuk SSK (menurut jenjang) maka perwakilan memiliki kewajiban mensosialisasikan dan memfasilitasi kepada OPD KB untuk dapat mereplikasi. Disamping itu perwakilan BKKBN dapat mengembangkan pembentukan model SSK di jenjang lainnya.</p> <p>b. Sosialisasi dan fasilitasi pembentukan SSK kepada Kab/Kota (OPD PPKB, Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag)</p> <p>2. Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK)</p> <p>Pembentukan dan Penerapan PTPK di setiap Perguruan Tinggi (PT) yang berada di Provinsi (Perkuliahan, Kemahasiswaan/KKN dan Forum Mahasiswa Peduli Kependudukan, Penelitian dan Pojok Kependudukan)</p> <p>Catatan:</p> <p>Diikuti dengan kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan orientasi untuk pembentukan PTPK</p> <p>Jalur Non Formal</p> <p>a. Penerapan ASN peduli Kependudukan melalui Diklat Struktural/Teknis termasuk Pojok Kependudukan</p> <p>b. Penerapan Saka Kencana Kepramukaan melalui materi kependudukan pada jenjang kepramukaan</p> <p>Catatan:</p> <p>Diikuti dengan kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan orientasi untuk pembentukan ASN-PK dan Sakakencana</p> <p>Jalur In Formal</p> <p>a. Penyuluhan Kependudukan kepada kelompok kegiatan (poktan) dan pembentukan pojok kependudukan di Kampung KB</p> <p>Catatan:</p> <p>Diikuti dengan kegiatan sosialisasi, fasilitasi dan orientasi untuk pembentukan Mass-PK (Masyarakat Peduli Kependudukan)</p>	Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITPENDUK
5	Jumlah Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi Bidang Pengendalian Penduduk	Minimal melakukan 1 kali kunjungan ke masing2 kabupaten/kota terkait pendidikan kependudukan	Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITPENDUK
Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Provinsi						
6	Cakupan pembinaan kesertaan ber-KB dan peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB diseluruh tingkatan wilayah	Jumlah wilayah (kab/kota) yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB, peningkatan kualitas pelayanan KB yang sesuai dengan standarisasi pelayanan KB	Persentase Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITJALSWA
7	Jumlah penggerakan pelayanan KB MKJP	Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh petugas KB untuk pemantapan calon peserta/peserta KB agar bersedia menggunakan KB MKJP sampai dengan digerakan ke tempat pelayanan KB dan calon peserta/peserta KB menggunakan salah satu KB MKJP	Peserta KB	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITJALPEM
8	Jumlah penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK), wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus	Frekuensi Penggerakan pelayanan KB dan KR di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan terluar (DTPK) sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemendes tertinggal, wilayah miskin perkotaan dan sasaran khusus dalam rangka menurunkan tingkat unmetneed untuk meningkatkan kesertaan ber KB	frek/th/ kab	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITJALSUS

**DEFINISI OPERASIONAL, SATUAN, ALAT UKUR, PERIODE PENGUKURAN DAN PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA PUSAT DAN PROVINSI TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	ALAT UKUR	PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
9	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Jumlah Faskes dan Jejaring yang bekerjasama dengan BPJS dalam memberikan pelayanan KB yang sesuai dengan standar pelayanan KB (teregistrasi dengan K/0/KB BKKBN)	Persentase Faskes	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITJALSWA
10	Persentase Faskes yang melakukan promosi dan konseling Kesehatan dan hak-hak Reproduksi di Provinsi dan Kab/Kota	Kegiatan Promosi dan Konseling Kesehatan dan hak-hak reproduksi yang dilakukan di Fasilitas Kesehatan, baik itu FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) maupun FKRTL (Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan) yang meliputi : 1. Penyediaan materi promosi dan konseling di Faskes (FKTP dan FKRTL) 2. Pemberian informasi di Faskes 3. Pelayanan Kontrasepsi (KB PP & PK) 4. Pelayanan rujukan spesialisasi	Persentase Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITKESPRO
11	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KBKR di Kabupaten dan Kota	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan fasilitas kegiatan bidang KBKR di kabupaten dan kota untuk meningkatkan secara terpadu intensitas pembinaan sebagai upaya tindak lanjut dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi	Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITKESPRO
Bidang Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga Provinsi						
12	Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga diseluruh tingkatan wilayah	Jumlah Provinsi dan Kabupaten/kota yang melaksanakan program keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga di wilayahnya.	Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITHANLAN
13	Jumlah pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga) diseluruh tingkatan wilayah	Jumlah kegiatan sosialisasi dan diseminasi kebijakan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (Pembangunan Keluarga)	Kegiatan	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITBALNAK
14	Persentase Kabupaten/Kota yang mengembangkan kegiatan BKB Holistic Integrative	Realisasi jumlah kelompok BKB HI dibagi target kelompok BKB HI dikalikan 100 %	BKB HI di Kab/kKota	Laporan Khusus Unit Kerja/ Statistik Rutin	Semesteran/ Tahunan	DITBALNAK
15	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pembinaan Genre (PIK-R/M dan BKR)	Kab/Kota yang melakukan fasilitasi dan pembinaan PIK R dan BKR	Persentase Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja/ Statistik Rutin	Semesteran/ Tahunan	DITHANREM
16	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan BKL	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan program ketahanan keluarga lansia dan rentan serta pembinaan terhadap Bina Keluarga Lansia (BKL) diwilayahnya	BKL di Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja/ Statistik Rutin	Semesteran/ Tahunan	DITHANLAN
17	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pembinaan PEK dan pembentukan kelompok UPPKS	Jumlah kelompok UPPKS yang dibina/dibentuk dibagi target jumlah kelompok UPPKS yang mendapatkan pembinaan dikali 100 persen	kelompok UPPKS di Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja/ Statistik Rutin	Semesteran/ Tahunan	DITPEMKON
18	Jumlah Pembinaan, Monitoring, evaluasi dan Fasilitasi kegiatan Bidang KSPK	Jumlah pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi yang dilakukan oleh pengelola program PEK	Provinsi	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITPEMKON
Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi Provinsi						
19	Persentase Stakeholders/mitra kerja dan masyarakat diseluruh tingkatan wilayah yang mendapat Pembinaan Advokasi dan KIE program KKBPK	Rasio antara jumlah stakeholder/mitrakerja yang mendapatkan proses advokasi dibandingkan jumlah stakeholder. Rasio masyarakat yang terpapar proses KIE terhadap jumlah total masyarakat	Stakeholders/ mitra kerja	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITVOKKOM
20	Jumlah Pembinaan dan sosialisasi kebijakan, strategi dan materi advokasi dan KIE pembangunan KKBPK	Jumlah <i>technical assistant</i> / fasilitasi/ diseminasi kebijakan, strategi, dan implementasi program KKBPK oleh pengelola Advokasi dan KIE tingkat pusat	Provinsi	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITVOKKOM
21	Jumlah Penayangan informasi KKBPK melalui berbagai media cetak dan elektronik, media luar ruang dan seni dan budaya/tradisional	Jumlah penayangan materi promosi dan KIE dalam 5 media yang berbeda	Media	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITVOKKOM
22	Jumlah Pembinaan mekanisme operasional dalam penguatan pelayanan dasar masyarakat		Provinsi	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITBINLAP

**DEFINISI OPERASIONAL, SATUAN, ALAT UKUR, PERIODE PENGUKURAN DAN PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA PUSAT DAN PROVINSI TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	ALAT UKUR	PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
23	Jumlah wilayah yang mendapatkan dukungan pendampingan kemitraan dalam pembangunan KKB diseluruh tingkatan wilayah		Provinsi dan Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITBINHUB
24	Persentase kesertaan stakeholder dan mitra kerja dalam implementasi program KKBPK	Stakeholder adalah kementerian/lembaga pemerintah. Mitra kerja adalah lembaga atau organisasi non pemerintah.	stakeholder dan mitra kerja	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITBINHUB
25	Pengelolaan Data dan informasi program KKBPK di Provinsi	Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK yang terdiri dari: 1. Statistik Rutin (RR Dallap dan RR Pelkon) 2. Pendataan Keluarga dan PBDKI	Jenis Data	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITLAPTIK
26	Jumlah pengelolaan data dan informasi program KKBPK di provinsi	Pengelolaan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK yang ada di provinsi	Provinsi	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITLAPTIK
Dukungan Kegiatan Manajemen/Sekretariat Provinsi						
27	Dukungan Manajemen di Provinsi (termasuk gaji/001 dan pemeliharaan rutin/002)	1. Peningkatan pelayanan pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja melalui aplikasi SIPP (System Informasi Pembayaran Gaji Pegawai selama 13 bulan 2. Kepuasan Pimpinan dan pegawai dalam penerimaan gaji, uang makan dan tunjangan kinerja tepat waktu 4 (skala 1-4)	Bulan dan Provinsi	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	BIRUM
28	Persentase ketepatan Pembayaran Gaji dan uang makan Pegawai (Perwakilan BKKBN Provinsi)	1. Pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja melalui aplikasi SIPP 2. Jumlah pimpinan dan pegawai untuk mendapatkan gaji, uang makan dan tunjangan kinerja secara tepat waktu	Bulan	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	BIRUM
29	Jumlah penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	1. Langganan daya dan jasa 2. Pemeliharaan sarana dan prasarana serta mesin-mesin 3. Pemeliharaan gedung, bangunan dan halaman 4. Pemeliharaan Mess 5. Pemeliharaan rumah dinas pimpinan 6. Pembayaran PBB 7. Pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional 8. Penyelenggaraan jasa kebersihan, keamanan, pengemudi, pramubakti dan gudang alkon	Bulan	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	BIRUM
30	Jumlah penyelenggaraan Manajemen di Provinsi (Keuangan dan BMN, Perencanaan, Kepegawaian, Umum, dan Ortala)	Frekuensi waktu Penyelenggaraan dukungan Manajemen dan tugas teknis lainnya terkait perencanaan, keuangan, pengelolaan BMN, Organisasi, Tatalaksana, kepegawaian dan umum di Provinsi	Bulan	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	BIREN
31	Persentase pengadaan sarana prasarana sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK)	Pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan riil	Sarana dan prasarana	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	BIKUB
Pengawasan Provinsi						
32	Jumlah pelaksanaan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi	Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur di provinsi(Audit/Monev, Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Internal dan Eksternal, Focus Group Discussion (FGD), Diklat dan Workshop.	Provinsi	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	ITWIL I
33	Jumlah peningkatan pelaksanaan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK	Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya dan penerapan ZI WBK (Penyusunan PKPT dan PKAU, Pembinaan dan Konsultasi, Fasilitas Pemeriksaan Internal dan Eksternal, Konsolidasi dan Evaluasi Pengawasan, Evaluasi Penerapan ZI WBK dan PMPRB)	Provinsi	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	ITWIL II
Pelatihan Pengembangan Provinsi						
34	Jumlah SDM provinsi (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana -PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas	Jumlah SDM Provinsi (SDM Aparatur dan Tenaga Fungsional, termasuk Fungsional Penyuluh KB-PLKB/PKB) yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kapasitas melalui pelatihan	Orang	Laporan Khusus Unit Kerja/SIDIKA	Semesteran/ Tahunan	PULAP
35	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan SDM (SDM Aparatur dan tenaga Fungsional)	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Provinsi (pelatihan/seminar/kursus/penataran/orientasi/bimbingan di tempat kerja, dsb)	Provinsi/Kegiatan	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	PULAP
Penelitian dan Pengembangan Provinsi						
36	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK di Provinsi yang dimanfaatkan	Hasil Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi nasional yang meliputi 3 topik, yaitu kependudukan, KB, dan KS	Dokumen Penelitian	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	PUSNA

**DEFINISI OPERASIONAL, SATUAN, ALAT UKUR, PERIODE PENGUKURAN DAN PENANGGUNG JAWAB
INDIKATOR KINERJA PERJANJIAN KINERJA PUSAT DAN PROVINSI TAHUN 2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	DEFINISI OPERASIONAL	SATUAN	ALAT UKUR	PERIODE	PENANGGUNG JAWAB
37	Jumlah hasil-hasil penelitian dan pengembangan program KKBPK (KKB) yang dimanfaatkan	Hasil Penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan melalui seminar yang berisi 3 topik yaitu kependudukan, KB dan KS.	Dokumen Penelitian	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	PUSNA
PROYEK PRIORITAS NASIONAL (PRO PN)						
38	Pemenuhan Ketersediaan Alokasi di Faskes	Pemenuhan kebutuhan alokasi di fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS dan telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen BKKBN	Fasilitas Kesehatan (Faskes)	E-Monev Kemenkeu (SMART)	BULANAN/ TRIWULANAN	DITJALPEM
39	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi melalui Kelompok Kegiatan	Pola cakupan sistem promosi dan konseling kesehatan reproduksi terhadap kelompok kegiatan berbasis komunitas. Pola ini mencakup 2 lokasi lama (<i>existing</i>) yaitu Poktan yang meliputi BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK/R dan lokasi baru yang bersinergi dengan komunitas di bawah naungan K/L lain, misalnya : PKH (Program Keluarga Harapan) dari Kemensos dan Posyandu dari Kemendagri	Kelompok Kegiatan	E-Monev Kemenkeu (SMART)	BULANAN/ TRIWULANAN	DITKESPRO
40	Keluarga yang Memiliki Baduta Terpapar 1000 HPK	Jumlah keluarga baduta yang terpapar 1000 HPK dibagi target keluarga baduta per provinsi dikali 100%	Keluarga	E-Monev Kemenkeu (SMART)	BULANAN/ TRIWULANAN	DITBALNAK
41	Penguatan Peran PIK Remaja dan BKR dalam Edukasi Kespro dan Gizi bagi Remaja Putri sebagai Calon Ibu	Jumlah Poktan PIK R dan BKR yang melaksanakan edukasi Kespro dan Gizi untuk remaja	Poktan PIK R dan BKR	E-Monev Kemenkeu (SMART)	BULANAN/ TRIWULANAN	DITHANREM
INDIKATOR STRATEGIS DI LUAR RENSTRA						
42	Persentase BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	Merupakan mekanisme utk memberikan kepastian hukum atas penggunaan BMN dlm penyelenggaraan tugas fungsi K/L melalui penetapan atas status penggunaannya	BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran	BIKUB
43	Level maturitas/penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Kematangan/Kesempurnaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dalam Mencapai Tujuan Pengendalian Intern	Level Skala 1-5	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	ITWIL III
44	Persentase Kampung KB yang telah memiliki Kelompok Kerja (POKJA) Kampung KB	Terbentuknya pokja Kampung KB bertujuan meningkatkan penguatan kualitas pengelolaan Kampung KB dengan target sebesar 65%, baseline hingga akhir 2018 sebesar 38%	Kampung KB yang ada POKJA	Laporan Khusus Unit Kerja	Bulanan/ Tahunan	DITBINLAP
45	Jumlah Kampung KB Percontohan Tingkat Kabupaten dan Kota	Terbentuknya Kampung KB Percontohan di tiap kab/kota sebagai tempat pembelajaran Kampung KB dengan mengoptimalkan dana BOKB	Kampung KB Percontohan	Laporan Khusus Unit Kerja	Bulanan/ Tahunan	DITBINLAP
46	Persentase Kabupaten dan Kota yang melaksanakan Pembinaan PPKS secara Komprehensif di Kecamatan	Jumlah Kabupaten/Kota yang melakukan pembinaan terhadap PPKS yang di Kecamatan untuk menyediakan pelayanan komprehensif (8 pelayanan)	PPKS di Kab/Kota	Laporan Khusus Unit Kerja	Semesteran/ Tahunan	DITHANLAN
47	Persentase Kepala Keluarga (KK) terdata dalam Pendataan Keluarga	Jumlah KK yang masuk dalam database Pendataan Keluarga dibanding target Pendataan Keluarga 2015	KK terdata	PK	Bulanan/ Tahunan	DITLAPTIK
48	Persentase cakupan potensi Faskes dan Poktan yang teregister dalam database SIGA	Jumlah faskes dan poktan yang teregister tahun 2019 dibanding data SR 2018	Cakupan Potensi	SIGA	Bulanan/ Tahunan	DITLAPTIK
49	Persentase peta kompetensi PNS	Peta Kompetensi adalah hasil pengukuran kompetensi PNS di lingkungan BKKBN Provinsi tidak termasuk PKB/PLKB berdasarkan metode Assesment Center	Jumlah Pegawai	Laporan Pelaksanaan assesment Pegawai	Tahunan/ Semesteran	BIPEG
50	Tingkat internalisasi budaya kerja CETAK TEGAS yang dimiliki oleh PNS di BKKBN Provinsi	Pegawai Negeri Sipil Yang memiliki budaya CETAK TEGAS yang diukur melalui penilaian 360 ⁰	Skala	Penilaian budaya kerja melalui 360 derajat	Tahunan	BIPEG



**PERWAKILAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



@bkkbndiy



BKKBN_DIY



perwakilan BKKBN DIY



perwakilan BKKBN DIY

Alamat : Jalan Kenari No.58 (Timoho) Yogyakarta 55165

 (0274) 561215,513422

Fax. (0274) 549225 - 562936